



PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

RENSTRA RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025-2029



Disusun oleh:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685677, Faksimile (0291) 68191,
Laman dinlh.demakkab.go.id, Pos-el lingkhidup.demak@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang lingkungan hidup, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DinLH) Kabupaten Demak periode tahun 2025-2029 mendatang, kemudian dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan

penyusunan Rencana Kerja yang akan disusun setiap tahun sebagai rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja DinLH Kabupaten Demak. Proses penyusunan Rencana Strategis DinLH Kabupaten Demak melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renstra DinLH.

Persiapan penyusunan Renstra dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra 2025-2029 meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra serta penyiapan data dan informasi.

b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra DinLH

Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan yang mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

c. Penyusunan Rancangan Renstra DinLH.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPERIDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah

e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra DinLH.

Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

f. Penetapan Renstra DinLH.

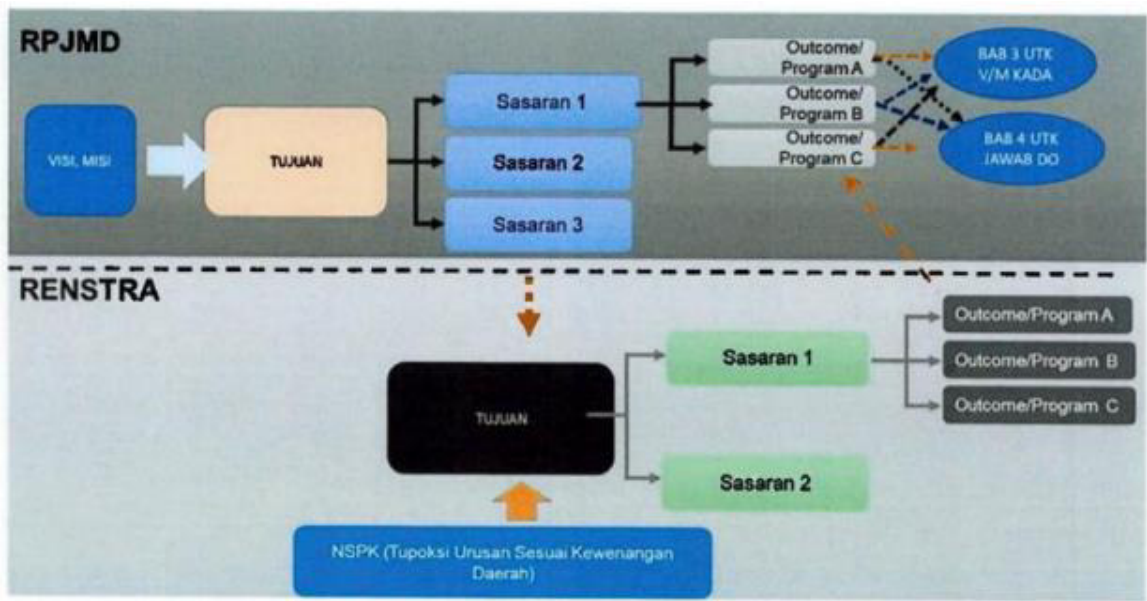
Rancangan akhir Renstra disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi. BAPPERIDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Keberadaan Renstra DinLH Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak. Dokumen Renstra DinLH merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra DinLH merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

g. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Adapun gambaran tentang hubungan Renstra DinLH dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan system perencanaan

pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut ini :

Gambar 1. 1
Keterkaitan Renstra dengan RPJMD



Adapun penyusunan Rencana Strategis DinLH Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini, selanjutnya rencana kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Demak harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengacu pada Dokumen RPJM Provinsi Jawa Tengah. Sehingga RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2025-2029 serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja BKPSDM. Penyusunan dokumen Rencana Strategis DinLH Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dsb. Dokumen Renstra DinLH, nantinya

akan digunakan sebagai acuan bagi DinLH dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya akan dilaksanakan oleh DinLH selama satu tahun dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka DinLH Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan yang strategis, konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kabupaten Demak, sebagai salah satu wilayah pesisir di Provinsi Jawa Tengah, menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup yang kompleks. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi yang meningkat telah memberikan tekanan signifikan terhadap kualitas lingkungan, termasuk pencemaran air dan udara, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta degradasi lahan dan ekosistem pesisir.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencanan Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/menlhk/setjen/kum.1/7/2020 Tahun 2020 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan

- Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029; dan
27. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, sumber daya,

kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 78 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

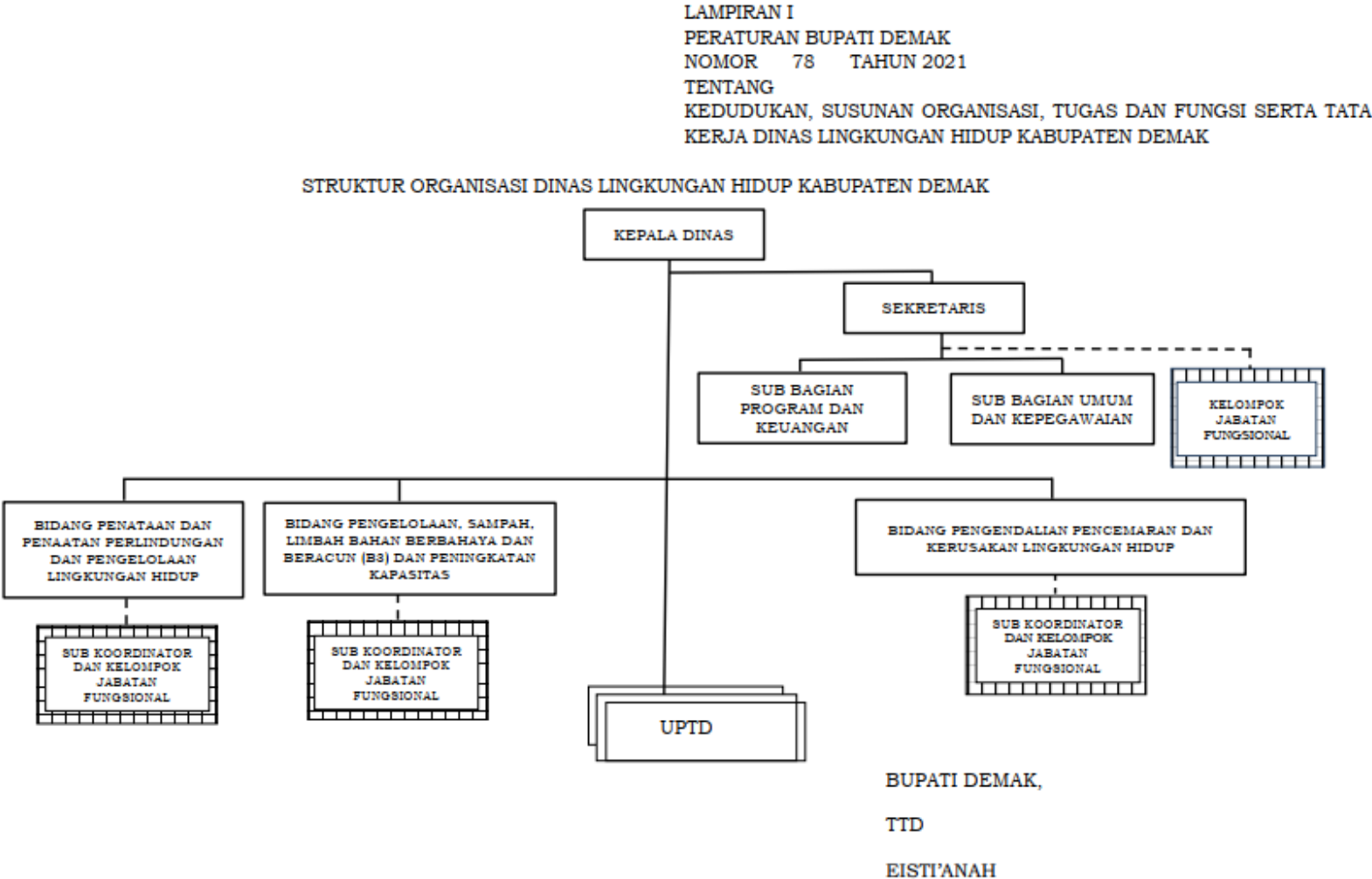
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak



Sumber : Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Uraian tugas jabatan struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan program dan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan. Tugas Subbagian Program dan Keuangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada subbagian program dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
- d. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan keuangan di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan keuangan di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program dan keuangan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan; dan
- h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;

- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sampah, Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai uraian fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak diklasifikasikan ke dalam Tingkat Pendidikan dan Golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		NonASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	9	2					11
1	SMP Sederajat	20						20
2	SMA Sederajat	35		20		123	9	187
3	D3						1	1
4	S1/D4	4	4	7	7	7	11	40
5	S2	5	1					6
6	S3							0
	Jumlah	73	7	27	7	130	21	265

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak per Juni 2025

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak terdiri atas Golongan IV, III, II, PPPK dan Non ASN sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	133	17	150
2	PPPK	7	28	35
3	PNS Golongan I	13	2	15
4	PNS Golongan II	43	0	43
5	PNS Golongan III	14	4	18
6	PNS Golongan IV	3	1	4
	Jumlah	213	52	265

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak per Juni 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak berasal dari APBD dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Aset Tanah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah bangunan pasar	2.057	2000	Sebelah lampu bangjo Jogoloyo	Hak pakai	17/04/2003	11.09.07.19.4.00024	persiapan pasar	pembelian	205.700.000	tanah persiapan pertokoan sebelah perempatan jalan lingkar jogoloyo
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	700	1991	Jl. Bhayangkara Baru No.1 Demak	Hak pakai	28/05/2019	11.09.12.04.4.00018	perkantoran	pembelian	33.600.000	Bangunan kantor lingkungan hidup
3	Tanah bangunan kantor pemerintah	20.520	2003	Desa Kalikondang	Hak pakai	06/11/1992	11.09.12.01.4.00010	TPA sampah Desa Kalikondang	pembelian	165.000.000	TPA Kalikondang
4	Tanah bangunan kantor pemerintah	88.632	2018	Desa Berahan Kulon Wedung Demak	Hak pakai	07/01/2019	11.09.12.04.4.00001	Dinas LH	pembelian	3.225.627.000	Tanah TPA Desa Berahan Kulon Tahun 2018
5	Tanah bangunan kantor pemerintah	4.460	2003	Desa Kalikondang	Hak pakai	01/07/2002	11.09.12.01.4.00013	Tanah Workshop	pembelian	437.700.000	Base camp DPUPPE Workshop
6	Tanah bangunan kantor pemerintah	56.794	2019	Desa Berahan Kulon Wedung Demak	Hak pakai	15/10/2019	11.09.14.07.4.00034	TPA	pembelian	2.450.855.600	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)sampah Berahan Kulon Tahap II

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
7	Tanah bangunan kantor pemerintah	105.200	2020	Desa Berahan Kulon Wedung Demak	Hak pakai	13/07/2020	11.09.14.07.4.00035	Tanah TPA	pembelian	7.590.497.450	Untiuk pembangunan TPA Desa di Berahan Kulon Kec Wedung Kab Demak (Tahap III)
8	Tanah lapangan lainnya	18.050	2003	Alun - alun Kab Demak	Hak pakai	22/06/1992	11.09.12.05.4.00051	Tanah lapangan	pembelian	7.590.497.450	Tanah lapangan upacara
9	Tanah untuk bangunan instalasi pengelolaan sampah	7.628	2018	Desa Candisari Mranggen	Hak pakai	20/05/2021	11.09.02.19.4.00029	Tanah TPA	pembelian	331.632.000	Koreksi tanah TPA Candisari

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025

Tabel 2. 4
Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan gedung kantor permanen	baik	200	Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	340.045.000
2	Bangunan gedung kantor permanen	baik	1.134	TPA Kalikondang Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	5.401.881.000
3	Bangunan gedung kantor permanen	baik	120	Jl. Kalikondang Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	30.000.000
4	Bangunan gedung kantor permanen	baik	270	Perum Desa Sriwulan	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	49.851.000
5	Bangunan gedung kantor permanen	baik	22.000	Jl. Kauman	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	12.260.053.630
6	Bangunan gedung kantor permanen	baik	85	Jl. Sunan Kalijaga	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	321.250.000
7	Bangunan gedung kantor permanen	baik	661,90	Jl. Sultan Fatah	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	645.024.000
8	Bangunan gedung kantor permanen	baik	92	Jl. Kyai Singkil	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	99.600.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
9	Bangunan gedung kantor permanen	baik	4.360	JL Pemuda	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	745.938.500
10	Bangunan gedung kantor permanen	baik	108	Jl. Sultan Trenggono	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	199.200.000
11	Bangunan gedung kantor permanen	baik	190	Jl. Sultan Fatah	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	498.100.000
12	Bangunan gedung kantor permanen	baik	287.168	Jl. Demak - Semarang	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	1.489.100.000
13	Bangunan gedung kantor permanen	baik	1.230	Jalan Semarang - Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	996.640.000
14	Bangunan gedung kantor permanen	baik	1.006,82	Jl. Sultan Fatah	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	1.245.330.000
15	Bangunan gedung kantor lainnya	baik	315	Desa Botorejo Kec Wonosalam Kab Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	148.214.000
16	Bangunan gedung lain - lain	baik	54	Sayung Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	149.430.000
17	Bangunan gedung laboratorium permanen	baik	200	Kantor Lingkungan Hidup	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	460.314.000
18	Bangunan gedung laboratorium lain - lain	baik	25	Jl.Bahyangkara Baru No. 1 Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	7.392.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
19	Gedung garasi/ pool permanen	baik	66	TPA Kalikondang Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	198.786.000
20	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	kurang baik	81,25	TPA Kalikondang Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	50.077.000
21	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	baik	300	TPA Kalikondang Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	1.083.640.000
22	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	baik	124	TPA Kalikondang Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	203.458.000
23	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	baik	72	Pembangunan TPST Kec Wedung	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	249.082.000
24	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	baik	64	Komplek Workshop	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	198.710.000
25	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	baik	399	Pembuatan taman traffic light Katonsari	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	116.960.000
26	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	baik	100	Jl. Bhayangkara Baru no.1 Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	61.400.000
27	Bangunan tempat kerja lainnya	kurang baik	258,50	Jl. Bhayangkara Baru no.1 Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	69.625.000
28	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	313,50	Kali Tuntang Lama Depan Polres Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	79.786.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
29	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	402	Kali Tuntang Lama Depan Kabupaten Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	90.700.000
30	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	474	Bantaran Kali Tuntang Depan Kodim	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	79.687.000
31	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	351	Bantaran Kali Tuntang Depan Polres lama	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	98.691.000
32	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	476	Bantaran kali tuntang Depan kodim	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	120.722.000
33	Bangunan tempat kerja lain - lain	kurang baik	4.801,50	Bantaran Kali tuntang Depan MI	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	89.785.000
34	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	350	Desa Katonsari Kec Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	21.930.000
35	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	54	Jl. Kadilangu Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	21.930.000
36	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	6	Jl. Sultan Fatah Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	29.450.000
37	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	6	Betengan Jl. Kadilangu Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	49.000.000
38	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	2	Komplek Kabupaten Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	9.996.750

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
39	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	165	Desa Kalikondang Kec Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	142.713.000
40	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	220,50	Perum Griya Bhakti Praja (RSS)	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	99.654.000
41	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	134	Bantaran sungai depan polres lama	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	99.600.000
42	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	800	Depan Stadion Mini Desa Katonsari	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	144.379.000
43	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	6	Sepanjang Jalan Pecinan Demak kota	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	59.768.000
44	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	6	Ruas Jalan pecinan demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	232.700.000
45	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	145,50	Bantaran sungai Kp. Krapyak Kel Bintoro Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	197.600.000
46	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	252	Desa Katonsari Kec Demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	197.600.000
47	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	137	Perum Griya Bhakti Praja (RSS)	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	197.600.000
48	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	81,50	Sepanjang Jl. Sultan Fatah Demak (sekitar simpang enam)	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	75.236.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
49	Bangunan tempat kerja lain - lain	baik	20	Rumah genset TPA Berahankulon Kec Wedung	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	199.638.000
50	Taman permanen	baik	914	Jl. Kalikondang- Katonsari	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	991.664.000
51	Taman permanen	baik	2.956	Pembangunan Taman kalituntang lam	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	1.768.299.000
52	Taman permanen	baik	92	Kabupaten demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	5.453.673.000
53	Taman permanen	baik	3.159,94	Jl. Sultan Trenggono	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	3.976.507.000
54	Taman permanen	baik	3.159,94	Jl. Sultan Trenggono	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	1.621.609.000
55	Taman permanen	baik	2.500	Bogorame demak	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	1.516.002.000
56	Taman permanen	baik	66	Taman Bogorame	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	198.440.000
57	Taman permanen	baik	92	Kabupaten Demak	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	198.980.000
58	Taman permanen	baik	85	Taman segaran kadilangu	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	494.433.000
59	Taman permanen	baik	389,70	Taman RTH Wil Mijen	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	241.949.800

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
60	Taman permanen	baik	624	Taman RTH Kebongading Kebonagung Kec Mranggen	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	197.427.000
61	Taman permanen	baik	121	Taman jalur hijau jl Adipati unus Wil mranak Kec Wonosalam	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	195.215.000
62	Taman permanen	baik	150	Taman RTH Wiku II Desa Katonsari Kec Demak	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	99.702.000
63	Taman permanen	baik	359	Taman Wiku I Desa Jogoloyo Kec Wonosalam	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	192.507.000
64	Taman permanen	baik	27	Kampung kenep Kel Mangunjiwan	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	124.693.000
65	Taman permanen	baik	20	Jl. SultanFatah Ex Vidio tron alun - alun	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	30.098.000
66	Taman lainnya	baik	399	Jl. Sultan Trenggono	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	197.714.000
67	Taman lainnya	baik	90	Jl. Sunan Kalijaga	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	188.972.000
68	Taman lainnya	baik	50,40	Jl. Sunan Kalijaga	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	98.037.000
69	Taman lainnya	baik	100	DLH (Jl. Bhayangkara Baru No. I)	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	203.395.000
70	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	baik	115,20	TPA Candisari Kec Mranggen	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	189.075.000
71	Tugu lainnya	baik	208	TPA Berahan Kulon Kec Wedung	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	624.650.600

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
72	Pagar permanen	baik	25	Pertigaan Jln Lingkar -Jl. Sultan Fatah depan SMPN 1 Demak	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	252.490.040
73	Pagar permanen	baik	30	Jl. Bhayangkara Baru No.1 Demak	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	89.020.000
74	Pagar permanen	baik	60	Jl. Bhayangkara Baru No.1 Demak	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	100.000.000
75	Pagar permanen	baik	170	TPA Candisari Kec Mranggen	0	Tanah hak lainnya	Pembelian	789.700.000
76	Pagar permanen	baik	325,50	TPA Candisari Kec Mranggen	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	99.250.000
77	Pagar permanen	baik	280	Pagar TPA Candisari Kec Mranggen	0	Tanah milik Pemda	Pembelian	149.612.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 202

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

a. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak berdasarkan capaian kinerja urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Adapun Faktor Pendukung capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak antara lain :

1. Komitmen Pimpinan

Dukungan dari kepala daerah (Bupati) terhadap kebijakan lingkungan.

2. Sistem Perencanaan dan Evaluasi yang Terstruktur

- a. Adanya Renstra dan Renja yang sinkron dengan RPJMD.
- b. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja program.
- c. Penerapan indikator kinerja yang terukur (IKU dan IKK).

3. Kerja Sama Lintas Sektor dan Lintas Perangkat Daerah

- a. Kolaborasi dengan dinas teknis lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM), Dinas Kelautan dan Perikanan (DINLUTKAN), Dinas Pertanian dan Pangan (DINPERTAN PANGAN), Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA), Dinas Perhubungan (DINHUB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (DINPERMADESP2KB), Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).
- b. Sinergi dalam program seperti pengelolaan sampah terpadu, pengurangan emisi, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4. Partisipasi Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

- a. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seperti bank sampah, kampung iklim, penghijauan, pengelolaan ekosistem pesisir dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- b. Dunia usaha mendukung pengendalian pencemaran melalui pemenuhan izin, *Corporate Social Responsibility* (CSR) lingkungan dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).

5. Ketersediaan Data dan Teknologi Informasi

Basis data lingkungan yang lengkap dan akurat (Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

6. Dukungan Regulasi dan Kebijakan

- a. Adanya perda yang mendukung pengelolaan lingkungan (Perda No. 1 Tahun 2023 Pengelolaan Sampah).
- b. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional seperti *Nationally Determined Contribution* (NDC), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan panjangkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK).

Adapun Faktor Penghambat capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak antara lain :

1. Terbatasnya Anggaran dan Pembiayaan

- a. Alokasi APBD untuk program lingkungan lebih kecil dibanding sektor lain (infrastruktur, pendidikan dan kesehatan).
- b. Minimnya dana untuk pemeliharaan sarana/prasarana lingkungan (Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan alat ukur kualitas udara/air).

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Jumlah pegawai teknis lingkungan/Lapangan yang kurang inovatif.
- b. Kurangnya kompetensi khusus misalnya pengendalian pencemaran, perizinan lingkungan, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

- a. Minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penghijauan, pencegahan pencemaran, atau pelestarian lingkungan.
- b. Perilaku membuang sampah sembarangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.
- c. Rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pengendalian pencemaran lingkungan.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

- a. Fasilitas pengolahan sampah belum memadai atau rusak (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) / Tempat Pembuangan Sampah dengan konsep untuk mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*rycycle*) (TPS3R), bank sampah, alat berat TPA).
- b. Keterbatasan sistem informasi manajemen lingkungan berbasis digital.
- c. Alat berat dan peralatan penunjang pengelolaan ruang terbuka hijau seperti crane/tangga hidrolik dan gergaji mesin yang telah usang dan perlu peremajaan.
- d. Belum optimalnya Alat pemantau kualitas air dan perlu adanya *maintenance* (Perawatan) secara berkala.

5. Kendala Regulasi dan Penegakan Hukum

- a. Penegakan hukum lingkungan yang masih belum optimal.
- b. Masih lemahnya koordinasi antar-instansi dalam pengawasan dan penindakan.

6. Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

- a. Peningkatan kejadian banjir, rob, kekeringan, dan abrasi yang memperparah kerusakan lingkungan.
- b. Lokasi pesisir seperti Kabupaten Demak sangat rentan terhadap perubahan garis pantai dan intrusi air laut.
- c. Gangguan terhadap fungsi RTH, kawasan lindung, dan sumber air bersih.

7. Kurangnya Dukungan Lintas Sektor

- a. Diperlukan peningkatan kolaborasi dan sinkronisasi program lingkungan dengan sektor lain (misalnya: perencanaan tata ruang, transportasi, pertanian dan kesehatan).
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan belum optimal.
- c. Masih rendahnya pentaaatan pelaku usaha terhadap hasil kajian lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL)).

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025 TW 1)	V (2026)	I	II	III	IV (TW 1)	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	83,86	83,96	87,5	87,825	88,125	86,36	87,23	87,37	N/A	N/A	102,98	103,89	99,85	N/A	N/A
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	-	-	76,98	77,75	78,65	79,67	80,02	75,46	77,11	77,20	N/A	N/A	98,03	99,18	98,16	N/A	N/A
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
5	Indeks Kualitas Udara	Angka	V	SDG's	84,85	84,87	84,89	84,55	84,56	80,67	84,43	72,53	N/A	N/A	95,07	99,48	85,44	N/A	N/A
6	Persentase penurunan pencemaran udara	%	V	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
7	Indeks Kualitas Air	Angka	V	SDG's	61,54	34,7619	61,74	73,17	73,27	37,02	66,60	55,61	N/A	N/A	60,16	191,59	90,07	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025 TW 1)	V (2026)	I	II	III	IV (TW 1)	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Persentase penurunan pencemaran air permukaan	%	V	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
9	Indeks Tutupan Lahan	Angka	V	SDG's	39,85	41,52	41,52	49,52	49,53	25,33	26,78	27,78	N/A	N/A	63,56	64,50	66,91	N/A	N/A
10	Rasio Luas Tutupan Lahan	%	V	-	18,42	18,42	18,42	18,57	18,62	18,42	11,04	14,37	N/A	N/A	100,00	59,93	78,01	N/A	N/A
a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	-	-	66,23	56,54	66,68	72,60	72,64	52,14	65,10	56,26	N/A	N/A	78,73	115,14	84,37	N/A	N/A
b.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	-	-	34,55	36,75	37,95	39,15	40,35	35,71	24,85	38,00	N/A	N/A	103,36	67,62	100,13	N/A	N/A
c.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proorsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Ton	-	-	25,00	27,50	30,00	32,50	35,00	25,00	27,50	30,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
d.	Emisi GRK	Gg CO2eq	-	-	1.354,88	1.354,80	1.354,72	1.354,64	1.354,56	1.715,86	1.688,43	1.470,37	N/A	N/A	73,36	75,37	91,46	N/A	N/A

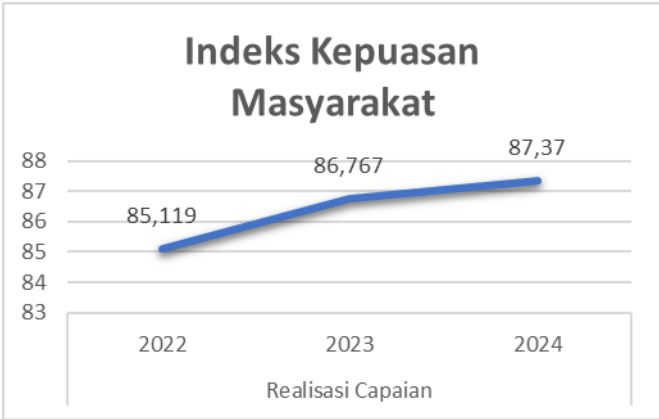
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025

Dari tabel 2.5 diatas dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak selama 3 (tiga) tahun, pertahunnya rata – rata tercapai 100%. Dari 14 (empat belas) indikator, sebanyak 6 (enam) indikator belum mencapai target. Berikut analisis atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak :

1. Analisis Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”

Mengacu pada tabel 2.5, Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan penilaian yang positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Pada tahun 2022 capaian Indeks kepuasan masyarakat mencapai 101,50% dari target 83,86, tercapai 85,119 dan tahun 2023 terealisasi senilai 86,767 dari target 83,96 atau sekitar 103,34% meningkat 1,84% dari tahun 2022 dan tahun 2024 capaian kinerja mencapai 99,85% dari target 87,50 dengan realisasi 87,37. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tersaji dalam grafik berikut ini:

Gambar 2. 2 Tren Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025

Berdasarkan gambar tren nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak di atas menunjukkan bahwa upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan telah berdampak kepada nilai IKM. Untuk menjaga dan meningkatkan tren positif ini, penting untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atau peningkatan nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - 1) Pelayanan perizinan lingkungan yang semakin mudah, cepat dan transparan,
 - 2) Tindak lanjut terhadap aduan masyarakat semakin responsif, cepat untuk segera diselesaikan,
 - 3) Pelayanan Persampahan yang kian ditingkatkan mengingat pertumbuhan penduduk yang meningkat.
 - 4) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin baik sebagai fasilitas umum untuk masyarakat.
- b. Keterlibatan Masyarakat
 - 1) Pembentukan Bank Sampah dan Program Iklim sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menangani isu lingkungan,
 - 2) Kampanye atau edukasi lingkungan yang melibatkan sekolah (Adiwiyata), serta komunitas pegiat lingkungan.
- c. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Semakin meningkatnya Kompetensi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
- d. Dukungan Pimpinan

Komitmen dari Kepala Dinas dan jajaran untuk menjadikan pelayanan sebagai prioritas utama.
- e. Evaluasi dan Monitoring Berkala
 - 1) Pelaksanaan survei IKM dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan.
 - 2) Feedback dari masyarakat dijadikan dasar untuk peningkatan mutu layanan.

2. Analisis Indikator Kinerja “Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti”

Berdasarkan tabel 2.5, Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terealisasi 100% sesuai dengan target. Untuk menampung aduan/keluhan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak menyediakan SP4N Lapor, media sosial Instagram serta layanan bersurat. Setiap tahunnya aduan/keluhan yang masuk telah ditindaklanjuti dengan baik dan responsif. Pelayanan yang responsif mencerminkan kemampuan pemerintah untuk memahami

kebutuhan masyarakat, untuk merespon dengan cepat dan memberikan solusi yang relevan serta efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya sasaran terwujudnya pelayanan publik yang responsif dipengaruhi oleh faktor yang saling mendukung antara lain:

a. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berintegritas

Kompetensi mencakup kemampuan teknis, pemahaman regulasi, serta ketrampilan interpersonal yang memungkinkan berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif. Sedangkan SDM yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial

Teknologi telah menjadi alat yang tidak terpisahkan dalam mendukung pelayanan publik yang responsif. Digitalisasi membuat pelayanan menjadi lebih cepat, terukur dan dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan aplikasi SP4N Lapor serta media sosial Instagram yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

c. Budaya pelayanan dan inovasi yang berkelanjutan

Keberhasilan pelayanan publik yang responsif di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tidak terlepas dari internalisasi *core values* ASN yang setiap minggu dibacakan pada saat apel pagi. Core values ASN yang terinternalisasi pada setiap pegawai akan mendorong perubahan budaya pelayanan dan akan meningkatkan kualitas pelayanan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti antara lain:

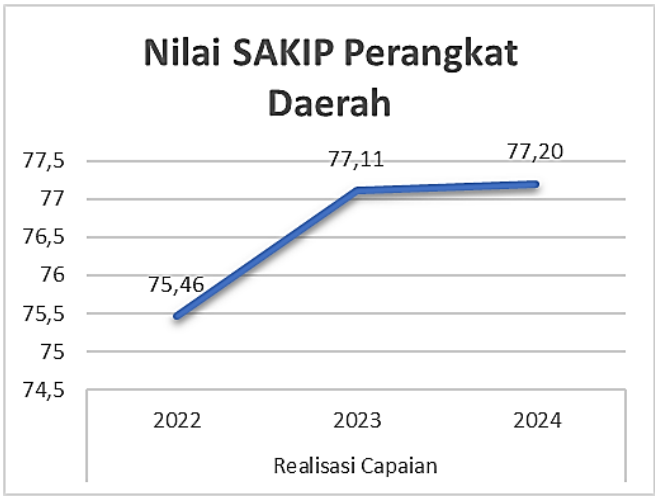
- a. Kurangnya jumlah pegawai yang kompeten dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pelayanan publik
- b. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif
- c. Anggaran yang terbatas menghambat pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi dan berbasis teknologi
- d. Aturan birokrasi yang terlalu panjang dan rumit sehingga menyebabkan kebingungan penerima layanan dan menghambat respon cepat dalam memberikan layanan

- e. Strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan antara lain:
- f. Mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai
- g. Mengusulkan peningkatan anggaran untuk pengembangan layanan
- h. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi terkait pelayanan lingkungan agar lebih sederhana dan jelas

3. Analisis Indikator Kinerja “Nilai SAKIP”

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak pada tahun 2022 capaian dibawah target dari target 76,98 tercapai 75,46 atau setara 98,03%. Sementara di Tahun 2023 tercapai 77,11 dari target 78,65 atau sekitar 99,18% dan ditahun 2024 tercapai 98,16% atau sekitar 77,20 dari target yang telah ditetapkan 79,67. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam bobot penilaian dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. Pencapaian Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dapat disajikan dalam grafik berikut ini:

Gambar 2. 3 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025

Meskipun belum dapat mencapai target, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan. Hal ini di perngaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Perencanaan yang semakin baik, terukur dan selaras.

- b. Penguatan pengukuran serta pelaporan kinerja yang selalu dilakukan dengan penyusunan laporan kinerja atas semua indikator kinerja baik program maupun kegiatan.
- c. Dijalankannya Monitoring serta dilaksanakannya evaluasi terhadap semua indikator kinerja baik program maupun kegiatan.

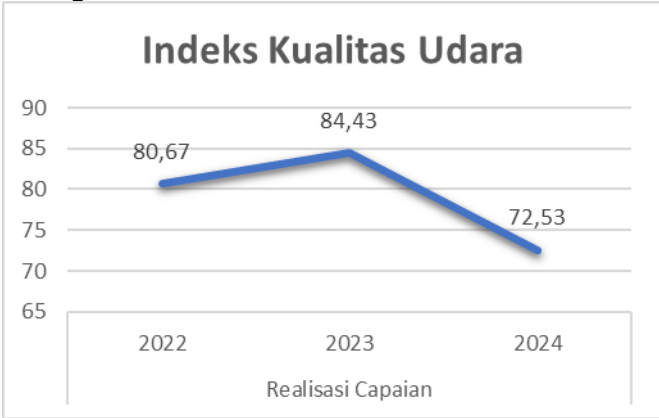
4. Analisis Indikator Kinerja “Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target”

Secara umum capaian terhadap persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang mencapai target ialah 100%. Pencapaian ini diperoleh melalui upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, khususnya dalam bidang pengelolaan persampahan, pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran, penataan ruang terbuka hijau, serta pelayanan perizinan lingkungan.

5. Analisis Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Udara”

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Indeks Kualitas Udara mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan kondisi kualitas udara. Pada Tahun 2022 Indeks Kualitas Udara mencapai 80,67 atau sekitar 95,07% dari target 84,85. Sedangkan pada tahun 2023 menunjukan indeks kualitas udara yang semakin membaik dengan capaian 84,43 atau sekitar 103,15% dari target 99,48. Namun pada tahun 2024 indeks kualitas udara mengalami penurunan dengan capaian 85,44% realisasi 72,53 dari target 84,89, atau turun sekitar 14,04% dari capaian tahun sebelumnya.

Gambar 2. 4 Capaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2022-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025

Sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan atau pencemaran udara di suatu wilayah dalam kurun waktu

tertentu. IKU merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Ada beberapa faktor pendukung capaian IKU (Indeks Kualitas Udara) antara lain :

- a. Penggunaan kendaraan rendah emisi (kendaraan listrik).
- b. Uji emisi kendaraan secara rutin dan pengawasan terhadap kendaraan tidak laik.
- c. Kepatuhan terhadap baku mutu emisi oleh industri.
- d. Penanaman pohon dan pengembangan taman kota untuk menyerap polutan udara.
- e. Larangan dan pengawasan terhadap pembakaran sampah secara terbuka di permukiman dan lahan.
- f. Sosialisasi dampak polusi udara kepada masyarakat salah satunya dengan program kampung iklim.

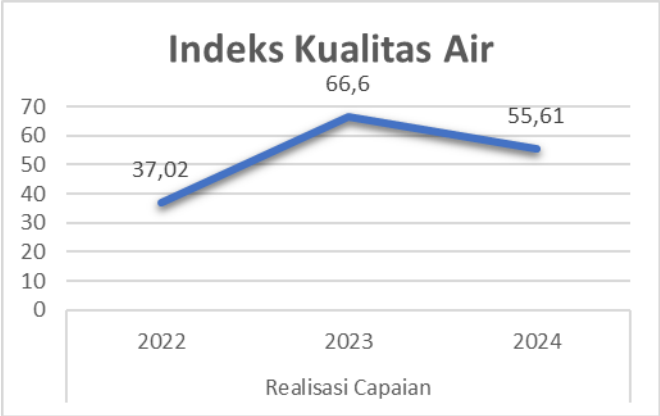
Adapun Faktor Penghambat Capaian IKU antara lain :

- a. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat semakin memperparah kualitas udara.
- b. Masih belum optimalnya pengendalian emisi kendaraan bermotor dan industri.
- c. Keterbatasan pejabat pengawasan lingkungan.
- d. Masih maraknya pembakaran terbuka, terutama di musim kemarau.
- e. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan tempat tinggal atau area komersial.

6. Analisis Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Air”

Capaian Indeks Kualitas Air selama 3 (tiga) tahun disajikan pada grafik dibawah ini :

Gambar 2. 5 Capaian Indeks Kualitas Air Tahun 2022-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025

Berdasarkan grafik diatas tren capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2022 realisasi IKA hanya mampu mencapai 37,02 atau sekitar 60,16% dari target yang ditetapkan sekitar 61,54. Selanjutnya pada tahun 2023 capaian IKA senilai 66,60 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 131,43% dengan target yang ditetapkan 34,7619 atau setara 191,59%. Hal ini dikarenakan penetapan target yang terlalu rendah pada saat itu. Kemudian pada tahun 2024 capaian IKA mengalami penurunan sekitar 10,58 dengan realisasi 55,61 atau setara 90,07% dari target yang telah ditetapkan 61,74.

Adapun faktor pendukung capaian Indeks Kualitas Air antara lain :

- a. Pengendalian Limbah Cair Industri, dengan adanya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
- b. Pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaku usaha khususnya pada pengelolaan limbah cair yang dihasilkan.
- c. Program ODF (*Open Defecation Free*) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) merupakan salah satu upaya menjaga badan air tidak menga
- d. Pemantauan kualitas air dengan pengujian kualitas air di 21 titik di seluruh wilayah Kabupaten Demak sebagai peringatan dini akan kualitas air.
- e. Peran Serta Masyarakat untuk tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai.
- f. Kegiatan POKASIH (program kali bersih) sebagai upaya menjaga kualitas air.

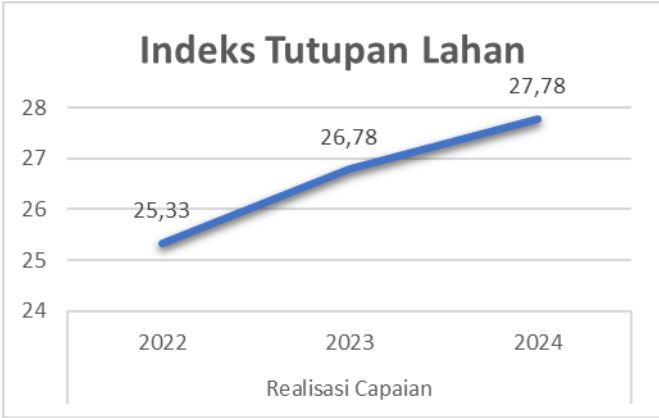
Meski beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas air, tidak terlepas dari itu beberapa faktor penghambatnya antara lain :

- a. Aliran sungai di Kabupaten Demak merupakan hilir dari beberapa daerah, sehingga sangat berpengaruh pada kualitas air di daerah atasnya atau hulunya.
- b. Masih seringnya limbah rumah tangga atau industri kecil yang dialirkan secara langsung ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu.
- c. Pembuangan Sampah ke Badan Air baik sampah plastik dan organik di sungai mengganggu kualitas air dan menurunkan kadar oksigen (*DO/Dissolved Oxygen*).

7. Analisis Indikator Kinerja “Indeks Tutupan Lahan”

Berikut visualisasi capaian indeks tutupan lahan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun

Gambar 2. 6 Capaian Indeks Tutupan Lahan Tahun 2022-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025

Berdasarkan grafik diatas tren capaian Indeks Tutupan Lahan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2022 Realisasi Indeks Tutupan Lahan senilai 25,33 sekitar 63,56% dari target yang ditetapkan yaitu 39,85. Meski terdampak cuaca ekstrim (el nino) sekitar juli sampai dengan desember 2023 capaian indeks tutupan lahan masih bisa mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit yaitu sekitar 1,45% dari tahun sebelumnya tahun 2022. Target 2023 41,52 dengan realisasi 26,78 atau sekitar 64,50%. Selanjutnya pada tahun 2024 berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan indeks tutupan lahan, sehingga mampu terealisasi 27,78 dari target 41,52 atau sekitar 66,91% meningkat 2,41% dari tahun sebelumnya.

Adapun beberapa faktor pendukungnya antara lain :

- a. Upaya penanaman kembali tanaman dibeberapa ruang terbuka hijau (RTH) yang telah mati masif dilakukan.
- b. Dukungan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari BUMD dan pihak swasta dalam Pengembangan dan Pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya Pemeliharaan taman kota, dan jalur hijau
- c. Melibatkan peran masyarakat umum dan pegiat lingkungan dalam penanaman mangrove di kawasan pesisir sebagai upaya pencegahan abrasi air laut.

Faktor Penghambat Capaian Indeks Tutupan Lahan antara lain :

- a. Alih fungsi lahan yang kian tidak terkendali, konversi lahan hijau menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur tanpa adanya kompensasi tutupan kembali.
- b. Cuaca Ekstrem, Musim kemarau panjang, El Nino, yang berkepanjangan mengakibatkan tutupan vegetasi mengalami kematian.
- c. Bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Demak tahun 2023 dan 2024 ikut memperparah jumlah tutupan vegetasi yang mengalami kerusakan sehingga menurunkan indeks tutupan lahan. Data luas tutupan lahan yang tidak update menyulitkan penilaian kinerja.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Tabel 2. 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggaran	Realisasi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025 TW 1)	V (2026)	I	II	III	IV (TW 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.634.521.829	13.871.089.828	14.958.740.000	17.426.743.300	28.647.526.300	13.495.417.218	13.376.290.682	14.603.164.155	N/A	N/A	92,22	96,43	97,62	N/A	N/A	19,15	2,74
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	8.000.000	4.000.000	8.000.000	20.000.000	-	7.801.000	3.600.000	N/A	N/A	-	97,51	90,00	N/A	N/A	30,00	17,95
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000		1.962.500	900.000	N/A	N/A	-	98,13	90,00	N/A	N/A	37,50	18,05
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000		1.991.500	900.000	N/A	N/A	-	99,58	90,00	N/A	N/A	37,50	18,27
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	2.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000		1.859.500	900.000	N/A	N/A	-	92,98	90,00	N/A	N/A	37,50	17,20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000		1.987.500	900.000	N/A	N/A	-	99,38	90,00	N/A	N/A	37,50	18,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.797.417.829	10.768.206.000	12.038.050.000	14.920.208.300	18.222.407.300	10.865.150.346	10.408.922.569	11.804.834.828	N/A	N/A	92,10	96,66	98,06	N/A	N/A	10,89	2,88
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.587.917.829	7.887.160.000	8.724.271.200	11.697.801.000	15.000.000.000	8.128.840.356	7.658.984.024	8.528.831.048	N/A	N/A	94,65	97,11	97,76	N/A	N/A	14,93	1,64

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggar an	Realis asi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (20 25 TW 1)	V (202 6)	I	II	III	IV (T W 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.209.500.000	2.881.046.000	3.313.778.800	3.222.407.300	3.222.407.300	2.736.309.990	2.749.938.545	3.276.003.780	N/A	N/A	85,26	95,45	98,86	N/A	N/A	0,08	6,57
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	-	2.962.000	4.962.000	N/A	N/A	-	98,73	99,24	N/A	N/A	16,67	22,51
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	3.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000		2.962.000	4.962.000	N/A	N/A	-	98,73	99,24	N/A	N/A	16,67	22,51
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	185.000.000	250.000.000	474.240.000	719.925.000	-	184.492.000	247.996.000	N/A	N/A	-	99,73	99,20	N/A	N/A	72,29	11,47
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	213.125.000		-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	N/A	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	185.000.000	250.000.000	474.240.000	506.800.000		184.492.000	247.996.000	N/A	N/A	-	99,73	99,20	N/A	N/A	43,49	11,47
Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.350.000	501.011.888	397.700.000	241.375.000	482.325.000	172.515.658	447.584.606	373.900.712	N/A	N/A	98,38	89,34	94,02	N/A	N/A	35,01	38,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	9.995.620	8.000.000	8.000.000	10.000.000	3.941.300	9.790.500	7.953.000	N/A	N/A	98,53	97,95	99,41	N/A	N/A	30,00	33,93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.370.000	100.000.000	80.000.000	70.725.000	70.725.000	50.597.600	91.822.200	77.294.700	N/A	N/A	94,81	91,82	96,62	N/A	N/A	6,50	17,59
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	11.998.100	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2.999.500	8.817.100	4.857.000	N/A	N/A	99,98	73,49	97,14	N/A	N/A	46,67	20,64
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.076.000	40.000.000	30.000.000	30.250.000	40.000.000	26.076.000	36.645.550	27.500.000	N/A	N/A	100,00	91,61	91,67	N/A	N/A	10,68	1,82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	3.360.000	5.978.168	7.000.000	6.000.000	6.000.000	3.360.000	5.040.000	5.160.000	N/A	N/A	100,00	84,31	73,71	N/A	N/A	15,71	17,86

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggar an	Realis asi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (20 25 TW 1)	V (202 6)	I	II	III	IV (T W 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perundang-undangan																	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10.000.000	10.000.000	3.780.000	7.000.000	-	8.775.000	9.697.000	N/A	N/A	-	87,75	96,97	N/A	N/A	6,00	3,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.544.000	320.030.000	227.500.000	82.020.000	300.000.000	85.541.258	283.763.256	211.324.512	N/A	N/A	100	88,67	92,89	N/A	N/A	50,14	49,01
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	3.010.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000		2.931.000	4.914.500	N/A	N/A	-	97,38	98,29	N/A	N/A	13,22	22,56
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	25.200.000	33.600.000	33.600.000		-	25.200.000	N/A	N/A	-	-	100	N/A	N/A	6,67	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	896.600.000	317.290.000	620.500.000	167.075.000	6.267.079.000	782.600.000	305.075.000	618.500.000	N/A	N/A	87,29	96,15	99,68	N/A	N/A	119,80	6,99
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	896.600.000	-	600.000.000	-	155.000.000	782.600.000	-	599.900.000	N/A	N/A	87,29	-	99,98	N/A	N/A	16,54	7,78
Pengadaan Alat Besar	-	-	-	-	5.500.000.000	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	N/A	-	-
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	206.429.000	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	N/A	-	-
Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-	-	31.500.000	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	N/A	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	281.290.000	20.500.000	167.075.000	334.150.000	-	270.755.000	18.600.000	N/A	N/A	-	96,25	90,73	N/A	N/A	3,76	31,04
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	36.000.000	-	-	40.000.000	-	34.320.000	-	N/A	N/A	-	95,33	-	N/A	N/A	2,22	-

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggar an	Realis asi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (20 25 TW 1)	V (202 6)	I	II	III	IV (T W 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.000.000	304.569.526	316.827.000	507.000.000	515.000.000	233.431.680	283.449.955	292.626.944	N/A	N/A	79,13	93,07	92,36	N/A	N/A	14,92	8,45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	10,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.000.000	294.569.526	306.827.000	500.000.000	500.000.000	223.431.680	273.449.955	282.626.944	N/A	N/A	78,40	92,83	92,11	N/A	N/A	15,09	8,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.470.154.000	1.784.012.414	1.326.663.000	1.106.845.000	2.415.790.000	1.441.719.534	1.736.003.552	1.256.743.671	N/A	N/A	98,07	97,31	94,73	N/A	N/A	12,86	4,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.884.000	90.000.000	90.000.000	114.950.000	135.000.000	64.772.389	82.139.854	61.177.913	N/A	N/A	99,83	91,27	67,98	N/A	N/A	21,61	1,85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	875.900.000	974.110.000	825.683.000	682.560.000	1.365.120.000	858.873.145	939.361.348	788.188.758	N/A	N/A	98,06	96,43	95,46	N/A	N/A	11,17	2,74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	269.110.000	350.000.000	300.000.000	250.000.000	600.000.000	268.841.000	348.054.000	297.253.000	N/A	N/A	99,90	99,44	99,08	N/A	N/A	24,59	3,52
Pemeliharaan Mebel	-	1.000.000	-	1.000.000	5.000.000	-	999.600	-	N/A	N/A	-	99,96	-	N/A	N/A	80,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	10.150.000	-	10.075.000	20.150.000	-	9.790.000	-	N/A	N/A	-	96,45	-	N/A	N/A	19,70	-

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggar an	Realis asi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (20 25 TW 1)	V (202 6)	I	II	III	IV (T W 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.000.000	305.062.414	60.000.000	3.000.000	200.000.000	209.181.000	303.714.750	59.679.000	N/A	N/A	99,61	99,56	99,4 7	N/ A	N/ A	0,95	23,82
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.260.000	26.370.000	40.610.000	35.500.000	71.000.000	40.052.000	25.137.000	40.200.000	N/A	N/A	79,69	95,32	98,9 9	N/ A	N/ A	8,25	0,12
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	27.320.000	10.370.000	9.760.000	19.520.000	-	26.807.000	10.245.000	N/A	N/A	-	98,12	98,7 9	N/ A	N/ A	5,71	20,59
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	200.000.000	-	-	-	-	195.598.000	N/A	N/A	-	-	97,8 0	N/ A	N/ A	20,00	-
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/ A	N/ A	20,00	-
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/ A	N/ A	20,00	-
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	198.000.000	-	-	-	-	195.598.000	N/A	N/A	-	-	98,7 9	N/ A	N/ A	20,00	-
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-	-	198.000.000	-	-	-	-	195.598.000	N/A	N/A	-	-	98,7 9	N/ A	N/ A	20,00	-

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggar an	Realis asi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (20 25 TW 1)	V (202 6)	I	II	III	IV (T W 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.860.000.000	1.505.000.000	680.000.000	591.425.000	1.540.000.000	1.782.631.564	1.461.259.565	657.472.320	N/A	N/A	95,84	97,09	96,69	N/A	N/A	3,44	21,04
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.710.000.000	880.000.000	510.000.000	433.490.000	900.000.000	1.635.494.564	842.885.265	488.897.820	N/A	N/A	95,64	95,78	95,86	N/A	N/A	9,47	23,37
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.660.000.000	800.000.000	450.000.000	397.670.000	700.000.000	1.590.604.564	782.628.265	432.764.820	N/A	N/A	95,82	97,83	96,17	N/A	N/A	11,57	24,26
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	80.000.000	60.000.000	35.820.000	200.000.000	44.890.000	60.257.000	56.133.000	N/A	N/A	89,78	75,32	93,56	N/A	N/A	60,00	8,35
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	150.000.000	625.000.000	170.000.000	157.935.000	640.000.000	147.137.000	618.374.300	168.574.500	N/A	N/A	98,09	98,94	99,16	N/A	N/A	65,33	4,86
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	150.000.000	625.000.000	170.000.000	157.935.000	640.000.000	147.137.000	618.374.300	168.574.500	N/A	N/A	98,09	98,94	99,16	N/A	N/A	65,33	4,86

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggar an	Realis asi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (20 25 TW 1)	V (202 6)	I	II	III	IV (T W 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lingkungan Hidup pada Masyarakat																	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	1.674.990.00 0	2.239.200.00 0	2.570.000.00 0	2.541.685.00 0	3.500.000.00 0	1.600.222.80 0	2.170.952.10 0	2.427.032.27 5	N/A	N/A	95,54	96,95	94,4 4	N/ A	N/ A	21,79	17,22
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.674.990.00 0	2.239.200.00 0	2.570.000.00 0	2.541.685.00 0	3.500.000.00 0	1.600.222.80 0	2.170.952.10 0	2.427.032.27 5	N/A	N/A	95,54	96,95	94,4 4	N/ A	N/ A	21,79	17,22
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.594.990.00 0	1.909.100.00 0	2.570.000.00 0	2.541.685.00 0	3.500.000.00 0	1.521.466.80 0	1.844.220.10 0	2.427.032.27 5	N/A	N/A	95,39	96,60	94,4 4	N/ A	N/ A	23,89	19,84
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	80.000.000	330.100.000	-	-	-	78.756.000	326.732.000	-	N/A	N/A	98,45	98,98	-	N/ A	N/ A	20,00	33,33
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	75.000.000	26.900.000	30.000.000	44.805.800	100.000.000	44.850.000	26.900.000	29.710.000	N/A	N/A	59,80	100,0 0	99,0 3	N/ A	N/ A	6,67	11,25
Penyimpanan sementara Limbah B3	75.000.000	26.900.000	30.000.000	44.805.800	100.000.000	44.850.000	26.900.000	29.710.000	N/A	N/A	59,80	100,0 0	99,0 3	N/ A	N/ A	6,67	11,25
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	75.000.000	26.900.000	30.000.000	44.805.800	100.000.000	44.850.000	26.900.000	29.710.000	N/A	N/A	59,80	100,0 0	99,0 3	N/ A	N/ A	6,67	11,25

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggar an	Realis asi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (20 25 TW 1)	V (202 6)	I	II	III	IV (T W 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.000.000	60.000.000	45.000.000	68.080.000	290.000.000	39.600.000	56.675.950	39.695.500	N/A	N/A	99,00	94,46	88,2 1	N/ A	N/ A	125,00	0,08
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	60.000.000	45.000.000	68.080.000	290.000.000	39.600.000	56.675.950	39.695.500	N/A	N/A	99,00	94,46	88,2 1	N/ A	N/ A	125,00	0,08
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	40.000.000	-	-		19.800.000	37.035.000	-	N/A	N/A	99,00	92,59	-	N/ A	N/ A	20,00	33,33
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	20.000.000	20.000.000	-	-		19.800.000	19.640.950	-	N/A	N/A	99,00	98,20	-	N/ A	N/ A	20,00	33,33
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan	-	-	45.000.000	68.080.000	290.000.000	-		39.695.500	N/A	N/A	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	88,2 1	N/ A	N/ A	108,89	-

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggar an	Realis asi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (20 25 TW 1)	V (202 6)	I	II	III	IV (T W 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30.500.000	157.000.000	70.000.000	35.810.000	250.000.000	30.200.000	143.702.000	67.056.500	N/A	N/A	99,02	91,53	95,80	N/A	N/A	143,93	40,68
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.500.000	157.000.000	70.000.000	35.810.000	250.000.000	30.200.000	143.702.000	67.056.500	N/A	N/A	99,02	91,53	95,80	N/A	N/A	143,93	40,68
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30.500.000	157.000.000	70.000.000	35.810.000	250.000.000	30.200.000	143.702.000	67.056.500	N/A	N/A	99,02	91,53	95,80	N/A	N/A	143,93	40,68
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.633.303.000	5.393.131.372	5.645.440.000	4.205.539.200	6.000.000.000	2.352.987.015	5.328.668.046	5.582.691.924	N/A	N/A	89,35	98,80	98,89	N/A	N/A	25,57	45,75
Pengelolaan Sampah	2.633.303.000	5.393.131.372	5.645.440.000	4.205.539.200	6.000.000.000	2.352.987.015	5.328.668.046	5.582.691.924	N/A	N/A	89,35	98,80	98,89	N/A	N/A	25,57	45,75
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	2.148.803.000	4.889.831.372	-	-	-	1.873.161.015	4.844.152.143	-	N/A	N/A	87,17	99,07	-	N/A	N/A	20,00	33,33

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					Anggar an	Realis asi
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (20 25 TW 1)	V (202 6)	I	II	III	IV (T W 1)	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	484.500.000	503.300.000	1.233.316.000	439.270.000	500.000.000	479.826.000	484.515.903	1.204.130.300	N/A	N/A	99,04	96,27	97,63	N/A	N/A	0,64	50,32
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-		4.412.124.000	3.766.269.200	5.500.000.000		-	4.378.561.624	N/A	N/A	-	-	99,24	N/A	N/A	4,93	-
Jumlah	20.948.314.829	23.252.321.200	24.199.180.000	24.914.088.300	40.327.526.300	19.345.908.597	22.564.448.343	23.602.420.674	N/A	N/A	92,35	97,04	97,53	N/A	N/A	18,50	7,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pada tahun 2022 dari 7 (tujuh) program tercapai antara 59,80 sampai dengan 99,02, sehingga rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Pada tahun 2023 dari 7 (tujuh) program tercapai antara 91,53 sampai dengan 100, sehingga rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Pada tahun 2024 dari 8 (delapan) program tercapai antara 88,21 sampai dengan 99,03, sehingga rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik.

Rata – rata pertumbuhan anggaran tercapai antara (20,00) sampai dengan 143,93 dari 8 (delapan) program, 6 (enam) program terdapat peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya, 2 (dua) program yang anggarannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Rata – rata pertumbuhan realisasi tercapai antara (21,00) sampai dengan 45,75 dari 8 (delapan) program, 6 (enam) program dengan realisasi anggaran meningkat dari tahun sebelumnya, 2 (dua) program yang realisasi anggarannya menurun dari tahun sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, antara lain :

- a. Perencanaan yang baik;
- b. Pelaksanaan yang baik;
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan secara berkala;
- d. Komitmen bersama seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

Dari segi realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, anggaran yang tersedia dapat teralisasi rata-rata lebih dari 90% setiap tahunnya. Sisa anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dan negosiasi harga pada proses pengadaan barang dan jasa. Permasalahan yang sering timbul di dalam penyerapan anggaran adalah dimana terjadi ketidaksesuaian perencanaan dengan pelaksanaan.

c. Kelompok sasaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memiliki beberapa kelompok sasaran pelayanan antara lain:

1. Masyarakat Umum
 - a. Warga yang menerima manfaat dari kualitas lingkungan yang baik (udara, air, tanah, dan pengelolaan sampah).
 - b. Sasaran utama edukasi dan sosialisasi program lingkungan seperti bank sampah, gerakan memilah sampah, kampung iklim, dan penghijauan.
2. Dunia Usaha dan Industri
 - a. Perusahaan dan pelaku industri yang wajib memenuhi ketentuan lingkungan hidup seperti:
 - 1) AMDAL, UKL-UPL
 - 2) Izin lingkungan
 - 3) Pengelolaan limbah B3
 - 4) Pengendalian pencemaran dan emisi
 - b. Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap sektor ini.
3. Satuan Pendidikan
 - a. Sekolah dan perguruan tinggi sebagai mitra edukasi lingkungan.
 - b. Sasaran program Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan).
 - c. Sarana peningkatan literasi lingkungan sejak dini.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas Lingkungan
 - a. Mitra strategis dalam advokasi, kampanye, dan pelaksanaan program berbasis masyarakat.
 - b. Pelibatan aktif dalam pengawasan sosial terhadap kerusakan/pencemaran lingkungan.
5. Perangkat Daerah Lain (OPD)
 - a. Sinergi lintas sektor seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM), Dinas Kelautan dan Perikanan (DINLUTKAN), Dinas Pertanian dan Pangan (DINPERTAN PANGAN), Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA), Dinas Perhubungan (DINHUB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (DINPERMADESP2KB), Satuan

- Polisi Pamong Praja (SATPOLPP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).
- b. Dalam program bersama: pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sanitasi, atau pengendalian pencemaran.
6. Pemerintah Desa dan Kelurahan
- a. Mitra pelaksanaan program lingkungan di tingkat lokal.
 - b. Pelaksana kegiatan pengelolaan sampah skala desa, bank sampah, konservasi dan penghijauan.
7. Media Massa
- a. Sebagai penyebar informasi, edukasi, dan pengawasan publik terhadap isu lingkungan.
 - b. Dilibatkan dalam kampanye dan sosialisasi perubahan perilaku ramah lingkungan.

d. Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, DLH Kabupaten Demak membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan ini menjadi bagian integral dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan program, serta akselerasi pencapaian tujuan Pembangunan sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Mitra kerja DLH dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu mitra antar perangkat daerah, mitra vertikal, serta mitra eksternal lainnya. Mitra antar perangkat daerah mencakup unit kerja teknis seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Setda Bagian Organisasi, dan Setda Bagian Hukum. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk perencanaan strategis, penguatan akuntabilitas, pemenuhan anggaran berbasis kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) terkait Pengelolaan infrastruktur air limbah, TPA, TPS, drainase, dan pengendalian banjir. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) untuk Penataan ruang terbuka hijau (RTH) dan pemukiman berbasis lingkungan, Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dalam Penanganan dampak kesehatan akibat pencemaran,

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) untuk Penegakan Perda Lingkungan (Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal Tanggap bencana terkait pencemaran, abrasi, dan rob, Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk pengendalian banjir dan abrasi.

DLH juga bermintra dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Pelaksanaan program lingkungan di tingkat lokal: bank sampah, kampung iklim, pemilahan sampah, konservasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas antara lain :

- a. LSM Lingkungan dan Komunitas Hijau dengan melakukan pendampingan masyarakat, edukasi, dan konservasi contoh : FDH (Forum Demak Hijau), OISCA (*Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement*).
- b. Bank Sampah dan Komunitas 3R (*Reduce/Kurangi, Reuse/Gunakan Kembali, dan Recycle/Daur Ulang*) sebagai mitra teknis dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Gambar 2. 7 Bank Sampah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025

Mitra lain DLH adalah Satuan Pendidikan yang mempunyai peranan dalam Sekolah Adiwiyata dan perguruan tinggi, edukasi dan penelitian lingkungan. Dunia Usaha dan Industri terkait :

- a. Pelaku usaha sebagai mitra dalam pemenuhan kewajiban lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, limbah B3).
- b. *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan untuk program penghijauan, RTH, pengelolaan sampah, atau bantuan sarpras lingkungan.

DLH Kabupaten Demak bermitra erat dengan instansi vertikal, seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah untuk Koordinasi teknis, pengawasan, dan pembinaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pelatihan, dan bantuan teknis program nasional seperti ProKlim, SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon).

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Dalam upaya mewujudkan ruang terbuka hijau yang lestari, indah, dan fungsional, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kolaborasi ini menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pencapaian kinerja DLH, khususnya dalam pengelolaan dan perawatan taman-taman kota.

BUMD berperan aktif dalam mendukung perawatan taman, seperti bantuan bibit tanaman hias. Tidak hanya itu, beberapa BUMD juga memberikan kontribusi langsung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/ *Corporate Social Responsibility*) untuk kegiatan penghijauan dan edukasi lingkungan bagi masyarakat.

Dukungan ini sangat berarti, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang harus dibagi untuk berbagai sektor pembangunan. Dengan adanya sinergi ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mampu menjaga keberlanjutan fungsi taman sebagai paru-paru kota, ruang interaksi sosial, serta sarana edukasi dan rekreasi masyarakat.

Melalui komitmen bersama antara DLH dan BUMD, pengelolaan taman di Kabupaten Demak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,

tetapi juga menjadi bagian dari gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun BUMD yang sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan antara lain PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), PT. LKM Demak Sejahtera, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum, Bank Jateng, PT. Demak Sarana Sehat (DSS) (PERSERODA), PT. BPR BKK Demak, PT. DEMAK ANWUSA dan CV. Jaya Setia Plastik.

Tabel 2. 7
Kerjasama Pengelolaan Taman Kota Tahun 2025 oleh BUMD

No	BUMD / Perusahaan	Lokasi Taman
1	PT. BPR BKK Jateng	Hutan Kota Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Mahesa Jenar
2	PT. LKM Demak Sejahtera	Taman Jambu
3	Perumda Air Minum	Taman Bougenville
4	Bank Jateng	Taman Alun-Alun
5	PT. Demak Sarana Sehat (Perseroda)	Taman Belimbing
6	PT. BPR BKK Demak (Perseroda)	Taman TL Katonsari
7	PT. Demak Aneka Wira Usaha (Perseroda)	Taman Kijang
8	CV. Jaya Setia Plastik	Taman Jebor

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025

f. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan kerjasama dengan yayasan Bakau Manfaat Universal (BakauMU) dalam pengelolaan sampah plastik terpilah untuk diolah menjadi Eco Hex BRick dimana Eco Hex BRick akan digunakan sebagai alat pemecah ombak (APO) yang dapat menjaga dari abrasi dan rob.

Gambar 2. 8 Inovasi Pengelolaan Sampah (Eco Hex BRick)





Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025

g. Inovasi Perangkat Daerah

Guna semakin meningkatkan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak telah melakukan berbagai inovasi salah satunya dalam program persampahan. Beberapa inovasi dalam pengelolaan persampahan antara lain dengan pembentukan bank sampah. Bank Sampah merupakan salah satu inovasi strategis dalam pengelolaan lingkungan yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, Bank Sampah memainkan peran penting sebagai solusi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Pembentukan bank sampah yang saat ini, telah terbentuk 234 unit bank sampah yang terdiri dari 148 (63,25%) unit bank sampah kelompok masyarakat sedangkan 86 (36,75%) unit bank sampah sekolah/pegawai. Adanya bank sampah membawa dampak yang baik dalam pengurangan timbulan sampah di TPA. Pada Tahun 2024 bank sampah berhasil melakukan pengolahan sampah sebanyak 78.680 ton meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya 60.257 ton. Pengolahan sampah ini berarti mengurangi timbulan sampah sebanyak 28,92% pada tahun 2024 dan 22,69% pada tahun 2023.

Hasil dari Bank Sampah juga menghasilkan nilai ekonomi. Sebagai contoh total plastik yang terkumpul dari 6 (enam) bank sampah sekitar 8.792,07 kg dimana harga per kg sebesar Rp 1.500,00. Jumlah yang terbayar adalah Rp 13.188.105,00, ditambah akomodasi pengangkutan sekitar Rp 1.000.000,00 selama 4 bulan, maka jumlah keseluruhan adalah Rp 14.188.105,00 (Empat belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima rupiah). Nilai ekonomi ini akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya Bank Sampah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 8
Perolehan Sampah Plastik kurun waktu 4 bulan

No	Nama Bank Sampah	2024			2025	Jumlah
		Oktober (kg)	November (kg)	Desember (kg)	Januari (kg)	
1	Bank Sampah Wedung	1.493,00	2.480,00	-	-	3.973,00
2	Bank Sampah Sriwulan	206,00	1.327,20	1.325,00	781,00	3.639,20
3	Bank Sampah Loireng	728,00	-	-	288,87	1.016,87
4	Bank Sampah Sejahtera	-	-	-	86,00	86,00
5	Bank Sampah Berkah Jaya	-	-	-	72,00	72,00
6	Bank Sampah Gelatik Ceria	-	-	-	5,00	5,00
Total						8.792,07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Adanya Bank Sampah juga memunculkan adanya inovasi pengelolaan sampah. Sampah plastik yang sudah terpilah diolah menjadi Eco Hex BRick dimana Eco Hex BRick yang akan digunakan sebagai alat pemecah ombak (APO) yang dapat menjaga dari abrasi dan rob. Dengan cara ini, sampah plastik yang sulit terurai dapat dikendalikan, sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan khususnya pelestarian ekosistem pesisir. Dalam pelaksanaanya dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BRI Peduli dan BakauMu.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sebagai berikut:

a. Tantangan

Seiring dengan berkembangnya pembangunan di semua aspek / sektor kehidupan di kabupaten Demak, begitu juga dinamika masyarakat yang cepat dalam menggunakan media komunikasi sebagai upaya untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, maka pada sektor lingkungan hidup harus berpacu untuk memberikan pelayanan, pengawasan persetujuan lingkungan kepada masyarakat untuk mengurus/ mengajukan persetujuan lingkungan juga pelayanan dan perlindungan pengendalian pencemaran lingkungan akibat dari dinamika perkembangan masyarakat. Peraturan Bupati Nomer 58 Tahun 2018, tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah upaya yang signifikan sebagai pedoman dalam pengelolaan persampahan dan arah kebijakan pengurangan dan penanganan persampahan.

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin tinggi, berpotensi menurunkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), karena menurunnya Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
2. Volume sampah yang meningkat diperlukan pengelolaan persampahan dengan menambah persentase pengurangan sampah dan meningkatkan persentase sampah yang terlayani.
3. Perubahan iklim mikro, naiknya permukaan air laut dan *land subsidence* akan berdampak pada rusaknya lingkungan dan kepunahan keanekaragaman hayati sebagai penyangga ekosistem darat dan laut.
4. Penanggulangan ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati untuk menambah penghijauan dan ruang terbuka hijau.

5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan masih menganggap pengelolaan lingkungan hanya tanggung jawab pemerintah.
6. Belum adanya Anggaran dan Pendanaan alternatif sehingga masih bergantung pada APBD
7. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih menjadi tantangan besar, mengingat seringkali sanksi yang diberikan tidak cukup efektif.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah :

1. Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran, kesadaran masyarakat dalam mematuhi berbagai aturan terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran didukung oleh pengujian berkala kondisi air, udara dan tanah dengan alat uji yang memadai otomatis dan kontinue (onlimo) yang terpasang pada tahun 2022.
2. Tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama dalam pengurangan sampah di sumbernya bertambah, ditunjang dengan sarana dan prasarana penunjang persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup bertambah dan anggaran mencukupi. Tersedianya TPA yang luas memadai dan ditunjang sarana prasarana persampahan dan pengolahan yang cukup, sehingga dilakukan pengelolaan TPA sesuai dengan perencanaan.
3. Dukungan Pemerintah Daerah dan Forum antar OPD yang secara aktif melakukan FGD dalam rangka memberikan masukan dan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat Program Kampung Iklim (Proklam) di Kabupaten Demak meningkat jumlahnya dan pendampingan kader lingkungan.
4. Penghijauan, perencanaan pembangunan jalan kabupaten yang menjadi sabuk pantai. Program penghijauan, penanaman dan konservasi banyak dilakukan pada setiap kegiatan tertentu baik secara seremonial maupun disetiap kegiatan masyarakat, tumbuhnya komunitas dan pegiat -pegiat lingkungan serta kerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi Rob dan Vegetasi/ keanekaragaman pesisir.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memiliki fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Permasalahan utama dalam bidang lingkungan hidup Kabupaten Demak disusun berdasarkan hasil identifikasi dari berbagai sumber informasi yang relevan dan akurat. Sumber-sumber tersebut meliputi data capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, hasil evaluasi pelayanan publik, masukan dari masyarakat yang diperoleh melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta telaahan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Permasalahan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, permasalahan menggambarkan situasi atau hambatan nyata yang masih dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Permasalahan ini mencerminkan berbagai aspek, mulai dari masih rendahnya kualitas air, udara dan tutupan lahan, belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah, serta masih kurangnya penerapan ekonomi hijau. Dengan merumuskan permasalahan secara sistematis dan terukur, maka proses penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan ke depan akan lebih terarah, fokus pada penyelesaian akar masalah, serta mampu mendorong peningkatan kelestarian lingkungan hidup.

Permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yaitu : **“Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup”**, yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Rumusan Permasalahan
“Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Potensi kerusakan sebagai dampak aktivitas ekonomi	1. Belum maksimalnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan 2. Belum optimalnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2	Meningkat Kualitas air dan tutupan lahan masih rendah	1. Belum optimalnya pengendalian dan pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Belum maksimalnya kualitas perencanaan lingkungan hidup 3. Masih kurangnya pengembangan Ruang terbuka Hijau (RTH)
3	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan 2. Belum maksimalnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 (dokumen rencana pembangunan nasional lima tahunan), menempatkan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim sebagai salah satu fokus utama pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup tidak lagi diposisikan sebagai aspek pelengkap, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang inklusif, resilien, dan berketahanan iklim. Sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Agenda 2030 (SDGs), RPJMN periode ini mengarahkan berbagai sektor untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sesuai Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 yaitu

“Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam RPJPN Tahun 2025–2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

Berdasarkan hal tersebut, dalam RPJMN tertuang Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan cita – cita Indonesia yang tertuang dalam Visi Presiden dan Wakil Presiden. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut meliputi :

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.**

Berdasarkan uraian Prioritas Pembangunan tersebut dapat dilihat keselarasan antara Misi Presiden dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Demak periode 2025-2029.

Prioritas Pembangunan Nasional yang sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Demak periode 2025-2029 ada pada **Prioritas Nasional 8 : ” Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”**. Sasaran utama dalam Prioritas Nasional 8 tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang harmonis dengan alam dan budaya lokal
2. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**
3. Peningkatan toleransi, inklusi sosial, dan kohesi masyarakat
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan budaya
5. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan budaya

Pada Sasaran Utama Prioritas Nasional 8, yang memiliki keselarasan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak ada pada Sasaran Utama ke – 2. Dalam Sasaran Utama ke – 2 tersebut terdapat isu – isu yang menjadi kendala beserta arah kebijakan yang diambil guna mengatasi isu tersebut.

Dalam dokumen RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup**
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan

Selain 17 Program Prioritas RPJMN selaras juga pada 8 *quick wins* meskipun tidak ada yang langsung dan spesifik menyebut soal lingkungan, atau perubahan iklim.

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten

- 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional**
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak
5. Menambah dan memberikan program kartu-kartu kesejahteraan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran
6. Menaikkan gaji ASN (TNI/Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), serta pensiunan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem
- 7. Membangun dan melanjutkan infrastruktur desa dan kota, termasuk infrastruktur transportasi, teknologi, dan perumahan murah bersubsidi bagi masyarakat miskin, generasi muda, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)**
8. Menambah rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

b. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana.

Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran III sebagai acuan arah pembangunan bidang lingkungan hidup selama lima tahun ke depan. Renstra ini tidak hanya memuat kebijakan strategis pemerintah pusat, tetapi juga menjadi pedoman penting bagi seluruh pemerintah

daerah dalam merumuskan rencana pembangunan sektoral di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak perlu secara aktif melakukan telaah terhadap dokumen ini agar perencanaan daerah dapat berjalan sinergis dengan agenda pembangunan nasional.

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup 2025–2029 secara garis besar menekankan pada 5 (lima) sasaran strategis :

1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim
3. Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak

Tabel 2. 9
Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Renstra Kementerian
Lingkungan Hidup 2025-2029

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1) Pengarusutamaan RPPLH dan D3TLH sebagai dasar pembangunan.
	2) Pemulihan ekosistem gambut dan perairan darat.
	3) Inventarisasi lingkungan hidup, daya dukung–daya tampung, serta cadangan SDA.
	4) Pengendalian pencemaran dan kerusakan (air, udara, laut, lahan, kehati).
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	1) Penurunan emisi GRK dari 5 sektor sesuai NDC.
	2) Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim (adaptasi pertanian, pesisir, perikanan, dsb.).
	3) Optimalisasi instrumen nilai ekonomi karbon (perdagangan karbon, MRV).

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
3. Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	4) Pengembangan teknologi hijau dan infrastruktur ramah iklim.
	5) Pengembangan ekonomi sirkular (bank sampah, daur ulang, pemanfaatan limbah B3/non-B3).
	6) Peningkatan nilai ekonomi karbon.
	7) Pemanfaatan instrumen ekonomi lingkungan hidup (pembayaran jasa lingkungan, sustainable finance).
	8) Hilirisasi dan industrialisasi SDA ramah lingkungan.
4. Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor	9) Penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana lingkungan.
	10) Pengawasan kepatuhan dunia usaha melalui PROPER, audit lingkungan, dan pengawasan berbasis risiko.
	11) Pemulihan lingkungan hidup pasca-kerusakan.
	12) Kolaborasi lintas sektor (pusat, daerah, masyarakat, dunia usaha).
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak	13) Transformasi digital melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terpadu (SIERRA, AmdalNet, SIPSN, dll.).
	14) Penguatan Enterprise Architecture KLH/BPLH.
	15) Reformasi birokrasi berbasis akuntabilitas dan manajemen risiko.
	16) Peningkatan layanan publik digital yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

c. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025–2029 menempatkan isu lingkungan sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap risiko iklim. Terdapat perhatian khusus terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta perlunya penguatan tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan adaptif.

Fokus sektor lingkungan diarahkan pada upaya pelestarian sumber daya alam, pengendalian pencemaran, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), serta penguatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Upaya ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, terutama pada prioritas nasional ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berikut isu strategis dan arah kebijakan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang termuat pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025–2029 :

a. Isu Strategis

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Meningkatnya timbunan sampah
3. Alih fungsi hutan dan degradasi sumberdaya hutan/lahan
4. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut
5. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati
6. Peningkatan intensitas kejadian bencana alam hidrometeorologis dan perubahan iklim

b. Arah Kebijakan

1. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati;
2. Peningkatan inisiatif dan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim;
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui pengelolaan limbah domestik dan industri baik padat maupun cair;
4. Peningkatan ketahanan sumber daya air dengan penguatan infrastruktur, pengelolaan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air secara aman dan berkelanjutan;
5. Peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif;
6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
7. Pelaksanaan reforma agraria dan penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

8. Peningkatan keterwujutan penataan ruang.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembengan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031

Tabel 2. 10
Indikasi Program Revisi RTRW Kabupaten Demak 2011 – 2031
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

NO .	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
C	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG			
II	PerwujudanSistemPrasarnaTransportasi			
2. 1	SistemJaringanTransportasiJalan			
	a. Program pengembangan sistem prasarana jalan			
	5. Pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU Dinas Lingkungan Hidup
V	PerwujudanSistemSumber Daya Air			
	Pelestariansumbermataair dan konservasi daerah resapan air	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	Pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam	-Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Demak -Kecamatan Bonang -Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Penetapan kawasan imbuhan air tanah untuk menjadi kawasan lindung	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan daya tampung sungai dan air permukaan	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
	Monitoring dan pengawasan terhadap buangan limbah industri dan rumah tangga untuk memastikan daya tampung sungai dalam status baik	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
VI	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya			
	a. Sistem Persampahan			
	Peningkatan dan pengembangan TPA	Seluruh Kabupaten	APBN APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengelolaan sampah 3R	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Kajian teknologi pemanfaatan energi dari sampah TPA	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
	Pembangunan instalasi energi dari sampah di tingkat TPA	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
	c. Sistem Jaringan Air Limbah			

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri	-Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Mijen -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Karangawen	APBD Swasta	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta
	Pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja	- Kawasan Perkotaan Demak -Kawasan Perkotaan Mranggen -Kawasan Perkotaan Wedung -Ibukota Kecamatan Wonosalam	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja	-Ibukota Kecamatan Gajah -Ibukota Kecamatan Karanganyar -Ibukota Kecamatan Mijen -Ibukota Kecamatan Bonang -Ibukota Kecamatan Sayung -Ibukota Kecamatan Karangtengah -Ibukota Kecamatan Guntur -Ibukota Kecamatan Dempet -Ibukota Kecamatan Karangawen -Ibukota Kecamatan Kebonagung	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Normalisasi saluran sungai	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
D	PERWUJUDAN POLA RUANG			
I	Perwujudan Kawasan Lindung			
	a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya			
	Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat	-Kecamatan Karangawen -Kecamatan Mranggen	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	b. Kawasan perlindungan setempat			
	1. Arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran dilakukan melalui program			
	Penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan	Seluruh kecamatan yang berada di kawasan perlindungan setempat	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup

NO .	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Penertiban bangunan diatas saluran irigasi		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Satpol PP
	Penghijauan			- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	2. Arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui program	-Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Bonang -Kecamatan Wedung		
	Penetapan batas sempadan pantai		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengelolaan kawasan tanah timbul		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penetapan batas kawasan pasang surut		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penghijauan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	3. Arahan perlindungan sempadan embung			
	Penetapan batas sempadan embung		APBD	- Dinas PUTARU - DinasLingkun gan Hidup
	Penertiban pemanfaatan ruang di sekitar embung		APBD	- Dinas PUTARU - DinasLingkun gan Hidup
	Pengelolaan embung		APBD	- Dinas PUTARU

NO .	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				- Dinas Lingkungan Hidup
	Penghijauan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	4. Arahan perlindungan terhadap ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Penetapan ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Penertiban bangunan di sekitar ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	c. Perwujudan RTH			
	Pengembangan sabuk hijau untuk memisahkan antar kawasan yang rawan konflik fungsi		APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	d. Kawasan Ekosistem Mangrove			
	Arahan perlindungan kawasan ekosistem mangrove dilakukan melalui program :			
	Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya		APBD	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	Percepatan reboisasi kawasan cagar alam yang telah rusak		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	Percepatan reboisasi kawasan cagar alam yang telah rusak		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				- Dinas kelautan & Perikanan
	Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	e. Kawasan Cagar Budaya	-		
	Arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program	-Masjid Agung Demak -Makam Sunan Kalijaga Kadilangu -Cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati		
	Pelestarian bangunan cagar budaya		APBD	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
	Penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga		APBD	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
	f.Kawasan Bencana Alam			
	1. Arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui program			
	Pembangunan tanggul penahan abrasi	-Kecamatan Sayung-Kecamatan Karangtengah-Kecamatan Bonang-Kecamatan Wedung	APBN APBDProvinsiA PBD	- Kementerian PUPR- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah- Dinas PUTARU- Dinas Lingkungan Hidup- BPBD
	Penghijauan tepi pantai		APBD	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan dan Perikanan
	2. Arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program			
	Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	-Kecamatan Mranggen -Kecamatan Guntur -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Bonang -Kecamatan Mijen -Kecamatan Karanganyar -Kecamatan Kebonagung -Kecamatan Dempet -Kecamatan Gajah	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		-Kecamatan Wedung -Kecamatan Demak -Kecamatan Wonosalam -Kecamatan Karangawen		Lingkungan Hidup - BPBD
	Pengembangan jalur ruang evakuasi		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	3. Arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program			
	Pembangunan sumur dalam	- Kecamatan Bonang -Kecamatan Demak -Kecamatan Dempet -Kecamatan Gajah -Kecamatan Guntur	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan bangunan penyimpan air	-Kecamatan Karanganyar -Kecamatan Karangawen -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Kebonagung -Kecamatan Mijen -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Sayung -Kecamatan Wedung -Kecamatan Wonosalam	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	Pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	g. Kawasan Lindung Geologi			
	Pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutfah	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
II	Perwujudan Kawasan Budidaya			
	a. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi			
	2. Pemberian bantuan bibit tanaman pada lahan yang berkekerangan 25-40% yang dikuasai masyarakat;	-Kecamatan Karangawen -Kecamatan Mranggen	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	e. Perwujudan Kawasan Industri			
	3. Penetapan daya dukung dan dampak lingkungan hidup pada setiap Kawasan industri	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Lingkungan Hidup

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah terkait Kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana.

Tabel 2. 11
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Tema Isu	Isu-isu yang masuk kriteria strategis
Kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	1. Alih Fungsi Lahan
	2. Kualitas Air, Udara, dan Tanah yang Menurun
	3. Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
	4. Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
	5. Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Demak 2025-2029

Tabel 2. 12
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	-	-	-	-	-		
2.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor insudtri) (%)	-	-	-	-	-		
3.	Jumlah Perusahaan yang menerapkan sertifikat SNI ISO 14001 (%)	-	-	-	-	-		
4.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregistre (%)	-	-	-	-	-		
5.	Proporsi Tutupan Hutan terhadap Luas Keseluruhan (%)	-	-	-	-	-		
6.	Proporsi Lahan Kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan (%)	-	-	-	-	-		

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Demak 2025-2029

f. Telaahan Dokumen Lainnya (Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah Kabupaten Demak 2024)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan institusi teknis daerah yang memegang peranan sentral dalam upaya pengarusutamaan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dalam dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (RA-APID) Tahun 2024 dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2024 tentang rencana aksi adaptasi perubahan iklim daerah, DLH memiliki mandat kuat untuk menyelaraskan kebijakan, strategi, dan aksi nyata di bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap dinamika iklim lokal dan global.

RA-APID (Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah) secara eksplisit menempatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor kunci dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program adaptasi iklim di berbagai sektor. Hal ini mencakup tugas dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), pengelolaan data kualitas dan daya dukung lingkungan, serta pelibatan masyarakat melalui program Kampung Iklim dan Bank Sampah.

Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap potensi risiko dan kerentanan iklim di wilayah pesisir dan daratan rendah Kabupaten Demak, yang setiap tahunnya mengalami tekanan dari banjir rob, abrasi pantai, serta penurunan kualitas sanitasi dan lingkungan. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup berperan menjembatani pelaksanaan strategi adaptasi seperti konservasi daerah aliran sungai, restorasi mangrove, penguatan tata kelola persampahan, dan pengembangan RTH (Ruang Terbuka Hijau).

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup juga terlibat dalam penyelarasan dokumen perencanaan daerah, seperti KLHS, RPJMD, dan RKPD dengan prioritas adaptasi perubahan iklim sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024. Pengintegrasian ini menjadi penting dalam mendorong alokasi anggaran dan perencanaan lintas sektor yang berbasis risiko iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi, mulai dari keterbatasan data spasial, kapasitas kelembagaan, hingga sinergi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor, peningkatan

kapasitas SDM, serta dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun mitra pembangunan menjadi kunci penting dalam mendukung peran strategis Dinas Lingkungan Hidup ke depan.

g. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, ditetapkan visi pembangunan daerah yaitu **“Demak Semakin Bermartabat, Maju, dan Sejahtera”**. Visi tersebut merepresentasikan arah pembangunan Kabupaten Demak ke depan yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan.

Salah satu misi yang sangat relevan terhadap tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah **Misi Kelima**, yaitu **“Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Misi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menurunkan risiko perubahan iklim secara terintegrasi.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang sejahtera aman dan nyaman”**. Untuk mencapai tujuan tersebut Sasarannya ialah **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**.

Program prioritas yang menjadi mandat utama Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang antara lain: penyusunan dokumen perencanaan lingkungan (RPPLH, KLHS), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah terpadu, serta edukasi dan peningkatan kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan hidup. Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yaitu Program Prioritas 5 (Lima) **“Demak Mantap”** dan Program Prioritas 6 (Enam) **“Demak Tangguh dan Lestari”**.

Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak bukan hanya berperan sebagai pelaksana teknis, namun juga sebagai motor penggerak transformasi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Keberhasilan DLH dalam menjalankan program-program

prioritas tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan daerah menuju Demak yang bermartabat, maju, dan sejahtera.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 2. 13
Isu Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD Cek kk
			Global	Nasional	Regional	
Memperkuat ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusid dan Berkelanjutan	Potensi kerusakan sebagai dampak aktivitas ekonomi	Kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	Geopolitik dan Geoekonomi	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kerusakan lingkungan hidup
	Meningkat Kualitas air dan tutupan lahan masih rendah		Dampak Perubahan Iklim Global	Rendahnya Produktivitas	Penurunan tingkat kemiskinan	
	Belum optimalnya pengelolaan sampah		Perkembangan Teknologi Industri 5.0	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	
			Pergeseran Budaya akibat Teknologi Informasi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
				Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	
					Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	
					Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	
					Tata kelola pemerintahan yang dinamis	

Sumber: Analisis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan;
3. Meningkatnya pengelolaan sampah;
4. Meningkatnya penerapan ekonomi hijau.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Kualitas Pelayanan berbasis digital	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Sasaran 1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,2	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45	4,50	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	77,20	77,30	77,40	77,50	77,60	77,70	77,80	
Sasaran 1.2. Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan		Indeks Kualitas Air	Angka	55,61	73,17	73,27	73,37	73,47	73,57	73,67		
		Indeks Kualitas Udara	Angka	72,53	84,55	84,56	84,57	84,58	84,59	84,60		
		Indeks Tutupan Lahan	Angka	27,28	49,52	49,53	49,54	49,55	49,56	49,57		
Sasaran 1.3. Meningkatkan pengelolaan sampah		Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Angka	58,3	61,5	62,2	62,9	63,6	64,3	65		
		Sasaran 1.4. Meningkatkan penerapan ekonomi hijau	Kontribusi penurunan GRK kumulatif pendukung ekonomi (energi, industri dan pertanian)	Ton Co2eq	881353,09	1.368.684,13	1.856.015,17	2.343.346,21	2.830.677,25	3.318.008,30	3.805.339,34	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup NSPK RPJMN 1. Standar pcrsetujuan lingkungan di 12 sektor dan multisektor, standart pengelolaan limbah (B3, Non B3), standar pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular 2. Standar, pcngurangan emisi GRK, adaptasi dan mitigasi pcrubahan iklim												

Sumber data : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bidang Lingkungan Hidup dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
✓ Pengembangan tata kelola pemerintahan di perangkat daerah ditunjukkan melalui perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.	✓ Peningkatan tata kelola pemerintahan di perangkat daerah mencerminkan adanya perbaikan dalam struktur organisasi, proses kerja, serta mekanisme koordinasi antar unit kerja yang lebih efektif dan efisien	✓ Pemantapan tata kelola pemerintahan di perangkat daerah ditunjukkan melalui konsistensi penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik	✓ Percepatan tata kelola pemerintahan di perangkat daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang terarah dan terukur, didukung oleh digitalisasi layanan, penyederhanaan proses administrasi, serta penguatan kapasitas aparatur	✓ Perwujudan tata kelola pemerintahan di perangkat daerah merupakan perwujudan dari komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
✓ Pengembangan kualitas air, udara, dan tutupan lahan mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi	✓ Peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan	✓ Pemantapan kualitas air, udara, dan tutupan lahan dilakukan melalui penguatan kebijakan dan instrumen pengendalian lingkungan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan	✓ Percepatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan dilakukan melalui implementasi cepat kebijakan pengelolaan lingkungan yang efektif, termasuk pengendalian sumber pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, dan penanaman kembali kawasan hijau	✓ Perwujudan kualitas air, udara, dan tutupan lahan merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
✓ Pengembangan pengelolaan sampah melalui penerapan sistem pengelolaan terpadu yang melibatkan pemilahan, pengurangan, daur ulang, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, sekaligus	✓ Peningkatan pengelolaan sampah dilakukan dengan memperkuat kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan, meningkatkan efektivitas sistem pemilahan dan pengumpulan, serta	✓ Pemantapan pengelolaan sampah dilakukan dengan memperkuat regulasi dan standar operasional, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta	✓ Percepatan peningkatan pengelolaan sampah dilakukan dengan mempercepat implementasi teknologi pengolahan ramah lingkungan, memperluas program edukasi dan partisipasi masyarakat,	✓ Perwujudan pengelolaan sampah merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui penerapan sistem pengelolaan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sinergi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan	memperluas program edukasi dan kesadaran masyarakat guna mendukung pengurangan volume sampah dan peningkatan tingkat daur ulang	memastikan keberlanjutan program pengelolaan sampah melalui pengawasan dan evaluasi yang konsisten	serta memperkuat sinergi antar sektor untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan tingkat daur ulang secara signifikan	yang efektif, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan secara berkelanjutan
✓ Pengembangan penerapan ekonomi hijau tercermin dari semakin banyaknya inovasi dan praktik bisnis yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pengembangan energi terbarukan	✓ Peningkatan penerapan ekonomi hijau dilakukan melalui penguatan regulasi dan insentif bagi pelaku usaha yang mengadopsi praktik ramah lingkungan, peningkatan kapasitas teknologi hijau, serta perluasan program edukasi dan kampanye kesadaran untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	✓ Pemantapan penerapan ekonomi hijau dilakukan dengan memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik ekonomi berkelanjutan, memastikan konsistensi implementasi program hijau di berbagai sektor, serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang ramah lingkungan secara menyeluruh	✓ Percepatan penerapan ekonomi hijau dilakukan dengan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan, memperluas insentif bagi pelaku usaha hijau, serta mengintensifkan kampanye dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	✓ Perwujudan penerapan ekonomi hijau merupakan komitmen bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta pelaksanaan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial

Sumber data : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	keterangan
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup NSPK RPJMN 1. Standar persetujuan lingkungan di 12 sektor dan multisektor, standart pengelolaan limbah (B3, Non B3), standar pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular 2. Standar, pengurangan emisi GRK, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R melalui edukasi dan pemberdayaan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat Penguatan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berbasis teknologi, efisien, dan berkelanjutan	
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan terhadap tanah, air, udara, dan laut.	
			Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian emisi gas rumah kaca serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	
			Peningkatan sistem informasi peringatan dini pencemaran dan kerusakan lingkungan kepada masyarakat.	
			Integrasi prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.	
			Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJPD dan RPJMD untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.	
		Peningkatan keindahan wilayah dengan memperhatikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Pengelolaan RTH berbasis keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan iklim.	
		Pendekatan pertanian rendah karbon dan adaptif terhadap Perubahan Iklim untuk sektor pertanian (pengurangan emisi GRK dr keg pertanian), seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH ₄ dari Lahan Sawah - SgstemOf Rice Intensification (SRI), Penurunan Emisi CH ₄ dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH ₄ dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi;	Penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap pengelolaan limbah B3 melalui pelaksanaan verifikasi lapangan yang menyeluruh	
			Penguatan pengawasan terhadap perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025 - 2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas 5 (lima) **“Demak Mantap”** dan Program Prioritas 6 (Enam) **“Demak Tangguh dan Lestari”** Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas terdiri dari 2 (dua) yaitu :
 - a. Mantap
 - b. Tangguh dan Lestari

2. Kegiatan Prioritas terdiri dari 4 (empat) yaitu :
 - a. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama “Demak Terang dan Tertata”.
 - b. Pengelolaan Sampah Terpadu “Demak Resik”.
 - c. Rehabilitasi Kawasan Pesisir “Demak Ijo Royo-Royo”.
 - d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) “Demak Ijo Royo-Royo”

3. Aksi Prioritas terdiri dari 19 (sembilan belas) yaitu :
 - a. Penataan Ruang Kota dan Fasilitas Umum
 - b. Pelibatan Masyarakat & Komunitas Kota
 - c. Monitoring & Smart Lighting System
 - d. Penguatan Infrastruktur TPST dan TPS 3R
 - e. Pendirian dan Revitalisasi Bank Sampah
 - f. Sosialisasi dan Edukasi Lingkungan Sekolah & Rumah
 - g. Kemitraan & Inovasi Pengolahan Sampah Ekonomis
 - h. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Sampah
 - i. Festival Lingkungan & Apresiasi “Warga Resik”
 - j. Penanaman dan Rehabilitasi Hutan Mangrove
 - k. Pembangunan Sabuk Pantai & Penahan Gelombang (Breakwater)
 - l. Edukasi & Sekolah Pesisir untuk Anak dan Masyarakat
 - m. Penguatan Ekowisata dan Desa Wisata Mangrove
 - n. Monitoring dan Kajian Ekologi Pesisir
 - o. Pembangunan Taman Kota & Taman Edukasi
 - p. RTH di Lingkungan Sekolah dan Fasilitas Publik
 - q. Pengembangan RTH Inklusif & Ramah Anak
 - r. Kampanye & Gerakan Adopsi Taman oleh Komunitas
 - s. Monitoring, Evaluasi & Digitalisasi Peta RTH

Secara terinci, dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4. 1
Dukungan Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satua n	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran		
PP5. MANTAP																
KP7. PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PENERANGAN JALAN UTAMA - “Demak Terang dan Tertata”																
KP7 a.	Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama	Jumlah kawasan perkotaan tertata dan terintegrasi	lokasi		2	423.150.000	1	500.000.000	1	600.000.000	3	600.000.000	1	600.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP1. Penataan Ruang Kota dan Fasilitas Umum	jumlah taman, trotoar, halte, lampu taman, kursi publik, drainase yang tertata	lokasi	18	7	100.000.000	-	-	7	200.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP4. Pelibatan Masyarakat & Komunitas Kota	jumlah komunitas aktif yang mengikuti gerakan Jumat Bersih, mural tematik, adopsi taman	kelom pok	-	-	-	6	200.000.000	7	250.000.000	8	300.000.000	9	350.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP5. Monitoring & Smart Lighting System	jumlah koridor yang terintegrasi smart lighting (Sistem kontrol otomatis & dashboard pemantauan PJU)	titik	-	-	-	4	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
KP7 b.	Penataan Kawasan Perkotaan “Tera Kota Demak”	jumlah jalur pedestrian bergaya Majapahit-Islamic terbangun	km													
		jumlah taman dan RTH bertema Islam-Majapahit	lokasi		-	-	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satua n	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran		
PP5. TANGGUH & LESTARI																
KP3. PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU – DEMAK RESIK																
KP3	Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat	Persentase Volume sampah rumah tangga dan pasar yang terolah (reduce-reuse-recycle)	%	17,88	17,79	1.150.994.400	17,71	1.500.000.000	17,37	1.500.000.000	17,20	1.500.000.000	17,03	1.500.000.000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Jumlah bank sampah & TPST yang aktif	unit	8	8	172.170.000	8	-	8	50.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
		timbulan sampah per kapita	%	69,60	74,66	-	79,72	-	84,78	-	89,84	-	94,9	-	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Jumlah Keluarga aktif yang terlibat dalam pengelolaan dan pemilahan sampah	KK	411.522	428.022	-	444.522	-	461.022	-	477.522	-	494.022	-	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
	AP1. Penguatan Infrastruktur TPST dan TPS 3R	Jumlah Pembangunan TPST dan TPS 3R (Bangunan, alat press, motor sampah, bak kontainer, komposter)	unit	-	3	585.020.000	1	200.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
	AP2. Pendirian dan Revitalisasi Bank Sampah	Jumlah bank sampah desa yang aktif dan difasilitasi pengumpulan, pengelolaan tabungan, pelatihan manajemen	unit	8	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	100.000.000	9	150.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	AP3. Sosialisasi dan Edukasi Lingkungan	Jumlah Sekolah yang mengikuti sosialisasi dan edukasi	sekolah	181	200	35.810.000	220	30.000.000	240	100.000.000	260	150.000.000	280	200.000.000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	n Sekolah & Rumah	lingkungan (Kegiatan 3R, lomba kebersihan, kurikulum sadar sampah)														dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Jumlah RW yang mengikuti sosialisasi dan edukasi lingkungan (Kegiatan 3R, lomba kebersihan, kurikulum sadar sampah)	RW	10	12	50.000.000	14	50.000.000	16	50.000.000	18	100.000.000	20	150.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	AP4. Kemitraan & Inovasi Pengolahan Sampah Ekonomis	Jumlah komunitas/UM KM binaan Daur ulang plastik, sampah organik jadi pupuk, kreasi sampah digital	kelompok	3	5	10.000.000	7	12.000.000	9	14.000.000	11	16.000.000	13	18.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	AP5. Digitalisasi Sistem Pengelolaa n Sampah	Jumlah sistem digital yang aktif dan terintegrasi desa-kota (Aplikasi pelaporan TPS penuh, sistem insentif digital, dashboard)	aplikasi	1	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	AP6. Festival Lingkungan & Apresiasi "Warga Resik"	Jumlah penerima penghargaan Anugerah RW bersih, lomba video edukasi, kampanye kreatif	orang	3	3	38.255.200	3	30.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
KP5. REHABILITASI KAWASAN PESIR – DEMAK IJO ROYO-ROYO																

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
KP5	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Penguatan Komunitas	Luasan mangrove dan vegetasi pantai yang direhabilitasi	ha	-	0,68	30.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Jumlah kawasan pesisir yang ditata dan diproteksi	desa													
		jumlah Partisipasi kelompok masyarakat pesisir dalam rehabilitasi	kelompok	1	1	-	-	-	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Jumlah infrastruktur pelindung pesisir yang dibangun/rehabilitasi (breakwater, tambak hijau)	unit	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP1. Penanaman dan Rehabilitasi Hutan Mangrove	jumlah Bibit mangrove, pengayaan, zonasi, adopsi pohon yang tertanam	bibit	-	1.700	30.000.000	11.000	200.000.000	11.000	200.000.000	11.000	200.000.000	11.000	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP2. Pembangunan Sabuk Pantai & Penahan Gelombang (Breakwater)	jumlah pembangunan pelindung sabuk pantai dan penahan ombak (Batu groin, bambu apung, karung pasir, sabuk hijau)	unit		-	-	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP3. Edukasi & Sekolah Pesisir untuk Anak dan	jumlah sekolah yang mengikuti edukasi Modul konservasi, kebencanaan, ekowisata,	sekolah		-	-	-	-	6	120.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Masyarakat	pemanfaatan limbah laut														
		jumlah kelompok yang mengikuti edukasi Modul konservasi, kebencanaan, ekowisata, pemanfaatan limbah laut	kelompok		-	-	-	-	6	120.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP4. Penguatan Ekowisata dan Desa Wisata Mangrove	jumlah desa destinasi ekowisata aktif (Track mangrove, perahu wisata, produk olahan hasil pesisir	desa				-	-	-	-	1	200.000.000	2	400.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP5. Monitoring dan Kajian Ekologi Pesisir	jumlah Kajian abrasi, sedimentasi, kualitas air & tanah	kajian				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
KP6. PENGAMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) – DEMAK IJI ROYO-ROYO																
KP6	Pengembangan dan Pemanfaatan RTH Publik & Edukatif	Penambahan luas RTH kota/kabupaten	ha	-	1.791,576	318.361.900	2.090,172	247.950.000	2.388,768	300.000.000	2.687,364	350.000.000	2.985,960	450.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Jumlah taman kota/desa yang dibangun/ diperbarui	lokasi	-	2	387.996.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Persentase kecamatan yang memiliki taman publik minimal 1 titik	%		14,29	387.996.000	14,29	400.000.000	14,29	200.000.000	14,29	200.000.000	14,29	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		jumlah Partisipasi komunitas dalam	kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran		
		perawatan dan pemanfaatan RTH														
	AP1. Pembangunan Taman Kota & Taman Edukasi	jumlah taman kota dibangun/revitalisasi (Jalur pejalan kaki, gazebo, tanaman endemik, pencahayaan, toilet umum)	lokasi	-	-	-	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP2. RTH di Lingkungan Sekolah dan Fasilitas Publik	jumlah Taman sekolah, ruang terbuka puskesmas, kantor layanan, posyandu	lokasi	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP3. Pengembangan RTH Inklusif & Ramah Anak	jumlah RTH dengan akses difabel, permainan anak, papan edukasi lingkungan	lokasi	1	1	24.564.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP4. Kampanye & Gerakan Adopsi Taman oleh Komunitas	jumlah komunitas perawat taman, mural lingkungan, lomba taman	kelompok	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP5. Monitoring, Evaluasi & Digitalisasi Peta RTH	jumlah Dashboard (platform data) RTH aktif, peta interaktif publik	media		1	40.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025

4.1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak melaksanakan urusan wajib dan Bidang Lingkungan Hidup. Program, kegiatan dan subkegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tabel 4. 2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025-2030

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											N	KETERANGA
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.306.139.46		24.912.416.92		25.439.957.16		26.368.772.80		25.798.876.60			
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				22.306.139.46		24.912.416.92		25.439.957.16		26.368.772.80		25.798.876.60			
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.806.139.463		17.007.416.927		17.084.957.166		17.071.937.207		17.372.626.605		
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesekretariatan	IKM Dinas Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Angka)	87,37	87,82	88,12		88,42		88,72		89,02		89,32		SEKRETARIS	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											N KETERANGA
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.393.339.463		14.505.582.927		14.618.948.826		14.733.448.384		14.849.092.937	
	Tersedianya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.224.346.425		11.336.589.889		11.449.955.788		11.564.455.346		11.680.099.899	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	113	113	115		115		115		115		115		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					3.168.993.038		3.168.993.038		3.168.993.038		3.168.993.038		3.168.993.038	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	Tersedianya laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		668.750.000	
	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										N KETERANGA	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		0		0		0		68.750.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0		0		0		0		275		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	270	246	265		265		265		265		265		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					285.302.800		299.336.800		313.511.140		262.827.223		327.286.468	
	Terpenuhinya administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.994.400		4.994.400		4.994.400		4.994.400		4.994.400	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	20	20	20		20		20		20		20		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					52.957.400		52.957.400		52.957.400		52.957.400		52.957.400	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	30	30	30		30		30		30		30		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.008.500		5.008.500		5.008.500		5.008.500		5.008.500	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	25	25	25		25		25		25		25		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.152.500		15.152.500		15.152.500		15.152.500		15.152.500	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										N KETERANGA	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					4.990.000		4.990.000		4.990.000		4.990.000		4.990.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					175.000.000		189.034.000		203.208.340		152.524.423		216.983.668	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	200	200	200		200		200		200		200		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.835.600		49.835.600		49.835.600		0		49.835.600	
	Tersedianya jumlah BMD yang diadakan	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:Unit)	13	15	8		8		8		0		8		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											N KETERANGA
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.235.600		5.235.600		5.235.600		0		5.235.600	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	6	6		6		6		0		6		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					44.600.000		44.600.000		44.600.000		0		44.600.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	13	9	2		2		2		0		2		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					505.000.000		505.000.000		505.000.000		503.000.000		505.000.000	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		3.000.000		5.000.000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	70	70	50		50		50		30		50		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3		3		3		3		3		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											N KETERANGA
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		(Dengan Satuan:Laporan)													
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					962.661.600		1.037.661.600		987.661.600		962.661.600		962.661.600	
	Terpeliharanya BMD	Jumlah BMD yang terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	118	112	107		108		107		107		107		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					89.950.000		114.950.000		114.950.000		89.950.000		89.950.000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					563.800.000		613.800.000		563.800.000		563.800.000		563.800.000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	39	34	21		22		21		21		21		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	4	2		2		2		2		2		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		0		0		0		0	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	5	5	0		0		0		0		0		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		0		0		0	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											N KETERANGA
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)													
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3.891.600		3.891.600		3.891.600		3.891.600		3.891.600	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	1		1		1		1		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					35.500.000		35.500.000		35.500.000		35.500.000		35.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	50	50	50		50		50		50		50		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					19.520.000		19.520.000		19.520.000		19.520.000		19.520.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	16	16	32		32		32		32		32		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					225.000.000		50.000.000		50.000.000		90.000.000		40.000.000	
	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Dokumen)	3	1	2		1		1		2		1		KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENATAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					25.000.000		10.000.000		0		0		0	
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun (Dengan Satuan:dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										N	KETERANGA	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					0		10.000.000		0		0		0	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)	
	RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0		1		0		0		0		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota					25.000.000		0		0		0		0	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)	
	RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	1		0		0		0		0		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					200.000.000		40.000.000		50.000.000		90.000.000		40.000.000		
	Dokumen KLHS tersusun	Persentase Dokumen KLHS Tersusun (Dengan Satuan:persentase)	100		100		100		100		100		100		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD					200.000.000		40.000.000		50.000.000		90.000.000		40.000.000	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)	
	Tersusunnya KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		2		1		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					325.000.000		335.000.000		325.000.000		305.000.000		335.000.000		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											N KETERANGA
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya pengendalian dan pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan frekuensi kejadian pencemaran Lingkungan (Dengan Satuan:Persen)	36,84	40,7	44,56		48,42		52,28		56,14		60,00		KEPALA BIDANG P E N G E N D A L I A N PENCEMARAN DAN K E R U S A K A N LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					275.000.000		285.000.000		275.000.000		275.000.000		285.000.000	
	Tersediannya dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun (Dengan Satuan:dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)
2.11.03.2.01.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					245.000.000		250.000.000		245.000.000		245.000.000		250.000.000	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator P e n g e n d a l i a n P e n c e m a r a n Lingkungan)
	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan L a u t (D e n g a n Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan)
2.11.03.2.01.000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					30.000.000		35.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator P e n g e n d a l i a n P e n c e m a r a n Lingkungan)
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan)
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		30.000.000		50.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											N KETERANGA
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun (Dengan Satuan:dokumen)	5	5	1		1		1		1		1		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					50.000.000		50.000.000		50.000.000		30.000.000		50.000.000	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengendalian Kerusakan Lingkungan)
	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	1		1		1		1		1		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengendalian Kerusakan Lingkungan)
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					870.000.000		560.000.000		700.000.000		1.151.835.600		741.250.000	
	Meningkatnya pengembangan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) (Dengan Satuan:Ha)	n/a	4880,35	4885,90		4891,44		4896,99		4902,53		4908,08		KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					870.000.000		560.000.000		700.000.000		1.151.835.600		741.250.000	
	Terpenuhinya Luas RTH Perkotaan	Persentase Luas RTH perkotaan (Dengan Satuan:persentase)	0	8,79	8,80		8,81		8,82		8,83		8,84		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pemeliharaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup)
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					870.000.000		560.000.000		700.000.000		1.151.835.600		741.250.000	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pemeliharaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup)
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ha)	134,54	134,55	134,59		134,63		134,67		134,71		134,75		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pemeliharaan Sumber Daya Alam

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											N KETERANGA
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															dan Lingkungan Hidup)
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					30.000.000		35.000.000		30.000.000		25.000.000		35.000.000	
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang t e k e l o l a (D e n g a n Satuan:persen)	36,12	38,37	39,50		40,63		41,76		42,89		44,02		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, L I M B A H B A H A N BERBAHAYA DAN B E R A C U N D A N P E N I N G K A T A N KAPASITAS
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3					30.000.000		35.000.000		30.000.000		25.000.000		35.000.000	
	Terpenuhinya Usaha yang memiliki ijin B3	Persentase Usaha yang memiliki ijin B3 (Dengan Satuan:persen)	51,83	52,03	52,58		53,33		54,08		54,83		55,58		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengawasan L i m b a h B a h a n Berbahaya dan Beracun (B3))
2.11.05.2.01.000 5	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)					30.000.000		35.000.000		30.000.000		25.000.000		35.000.000	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengawasan L i m b a h B a h a n Berbahaya dan Beracun (B3))
	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dengan Satuan:Dokumen)	80	80	80		80		80		80		80		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3))

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										N KETERANGA	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					90.000.000		105.000.000		90.000.000		75.000.000		105.000.000	
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Dengan Satuan:persen)	22,86	41,70	41,80		41,90		42		42,10		42,20		KEPALA BIDANG PENATAAN DAN P E N A A T A N PERLINDUNGAN DAN P E N G E L O L A A N LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					90.000.000		105.000.000		90.000.000		75.000.000		105.000.000	
	Terpenuhinya Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	20	20	23		24		25		26		27		Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Subkor Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup)
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					90.000.000		105.000.000		90.000.000		75.000.000		105.000.000	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Subkor Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup)
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Dengan Satuan:Badan Usaha)	20	20	23		24		25		26		27		Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Subkor P e n g a d u a n d a n Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										N KETERANGA	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.000.000		35.000.000		30.000.000		25.000.000		35.000.000	
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:persen)	14,29	15	30		45		60		75		90		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, L I M B A H B A H A N BERBAHAYA DAN B E R A C U N D A N P E N I N G K A T A N KAPASITAS
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		35.000.000		30.000.000		25.000.000		35.000.000	
	Tercapainya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh (%) (Dengan Satuan:persen)	100	100	100		100		100		100		100		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					30.000.000		35.000.000		30.000.000		25.000.000		35.000.000	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophpi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:Entitas)	56	30	5		5		5		5		5		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.930.000.000		6.785.000.000		7.130.000.000		7.625.000.000		7.135.000.000	
	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (Dengan Satuan:persen)	17,88	23	26,35		29,7		33,05		36,4		39,75		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, L I M B A H B A H A N BERBAHAYA DAN B E R A C U N D A N P E N I N G K A T A N KAPASITAS
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					3.930.000.000		6.785.000.000		7.130.000.000		7.625.000.000		7.135.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGA N
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tercapainya jumlah sampah yang tertangani	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Dengan Satuan:persen)	94,8	94,96	94,98		94,99		95		95,01		95,02		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengelolaan sampah)
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					80.000.000		85.000.000		80.000.000		75.000.000		85.000.000	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengelolaan sampah)
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Dengan Satuan:Kelompok)	234	254	270		275		280		285		290		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengelolaan sampah)
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					3.850.000.000		6.700.000.000		7.050.000.000		7.550.000.000		7.050.000.000	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengelolaan sampah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Dengan Satuan:Ton)	366,593	396,233	396,593		396,953		397,313		397,673		398,033		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pengelolaan sampah)
			TOTAL:	22.306.139.463		24.912.416.927		25.439.957.166		26.368.772.807		25.798.876.605			

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup
yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak 2025-2030

No .	Indikator	Satua n	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,2	4,25	4,20	4,35	4,40	4,45	4,50	
2	Nilai SAKIP	Angka	77,20	77,30	77,40	70,50	70,60	77,70	77,80	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	56,26	72,60	72,64	72,69	72,73	72,77	72,82	Target IKLH Tahun 2025 -2029 ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa TengahTahun 2025-2029
4	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Angka	58,3	61,5	62,2	62,9	63,6	64,3	65	
5	Kontribusi penurunan GRK kumulatif pendukung ekonomi (energi, industri dan pertanian)	Ton Co2eq	881.353,09	1.368.684,13	1.856.015,17	2.343.346,21	2.830.677,25	3.318.008,30	3.805.339,34	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	56,26	72,60	72,64	72,69	72,73	72,77	72,82	Target IKLH Tahun 2025 -2029 ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa TengahTahun 2025-2029
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	18,96	24,97	30,97	36,98	42,99	48,99	55,00	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Rankhir RPJMD Kab. Demak 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Bidang Lingkungan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pembangunan bidang lingkungan hidup sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Renstra ini. Semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

**LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025-2029**

Pada bagian ini dijabarkan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025-2029. Setiap indikator dilengkapi dengan level indikator, nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, jadwal rilis, serta instansi perilis. Penjabaran masing-masing indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Definisi Operasional

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	Indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup suatu wilayah (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) berdasarkan tiga komponen utama, yaitu: Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan (IKL)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sasaran						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis																		
1	2	3	4	5	6	7	8																		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan DLH	Nilai SAKIP	Angka	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evalusi	<table><tr><th>No</th><th>Komponen yang Dinilai</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>a.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>b.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>c.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>d.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai Hasil Evaluasi</td><td>100</td></tr></table>	No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	a.	Perencanaan Kinerja	30	b.	Pengukuran Kinerja	30	c.	Pelaporan Kinerja	15	d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	Nilai Hasil Evaluasi		100	Akhir Tahun	Inspektorat Daerah Kab. Demak
No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)																							
a.	Perencanaan Kinerja	30																							
b.	Pengukuran Kinerja	30																							
c.	Pelaporan Kinerja	15																							
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																							
Nilai Hasil Evaluasi		100																							
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017	$IKM = \left(\frac{\text{Jumlah total nilai persepsi unsur}}{\text{Jumlah responden} \times \text{Jumlah unsur}} \right) \times 25$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak																		
	Program / Outcome																								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	%	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan kesekretariatan	$IKM = \left(\frac{\text{Jumlah total nilai persepsi unsur}}{\text{Jumlah responden} \times \text{Jumlah unsur}} \right) \times 25$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak																		
	Kegiatan / Output																								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen = Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak																		
	Sub Kegiatan / Proses																								

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.	Jumlah Dokumen = Jumlah dokumen perencanaan yang disusun perangkat daerah dalam satu periode	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen RKA yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.	Jumlah Dokumen = Jumlah dokumen RKA yang disusun perangkat daerah dalam satu periode	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen DPA yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.	Jumlah Dokumen = Jumlah dokumen DPA yang disusun perangkat daerah dalam satu periode	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.	Jumlah Dokumen = Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun perangkat daerah dalam satu periode	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Jumlah Dokumen = Dokumen Laporan Keuangan yang disusun perangkat daerah dalam satu periode	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif menerima gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam satu bulan/periode pembayaran.	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN = Jumlah ASN aktif yang terdaftar dalam daftar gaji bulan berjalan	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah dokumen administratif yang disusun dan disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Dokumen Administrasi ASN=Jumlah dokumen resmi yang diterbitkan/dihimpun untuk pelaksanaan tugas ASN dalam periode tertentu	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) dari Perangkat Daerah (PD) yang telah melalui proses rekonsiliasi dengan Badan Keuangan Daerah atau Bidang Aset.	Jumlah Laporan BMD yang Direkonsiliasi = Jumlah laporan BMD PD yang telah selesai direkonsiliasi dan disahkan oleh pihak berwenang	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah dokumen yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), yang meliputi kegiatan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset milik pemerintah daerah.	Jumlah Laporan BMD yang Direkonsiliasi = Jumlah laporan BMD PD yang telah selesai direkonsiliasi dan disahkan oleh pihak berwenang	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi	$= \left(\frac{\text{Jumlah aspek administrasi yang terpenuhi}}{\text{Total aspek administrasi yang wajib dilaksanakan}} \right) \times 100\%$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah seluruh paket pakaian dinas yang diberikan kepada pegawai dalam satu periode (biasanya 1 tahun), yang terdiri dari pakaian dinas beserta seluruh atribut kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi.	Jumlah Paket Pakaian Dinas = Σ (Jumlah pegawai yang menerima pakaian dinas lengkap)	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), baik teknis, fungsional, maupun struktural, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di lingkungan instansi selama periode tertentu (misalnya per tahun).	$= \left(\frac{\text{Jumlah pegawai sesuai tupoksi yang mengikuti diklat}}{\text{Total pegawai berdasarkan tupoksi}} \right) \times 100\%$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	$= \left(\frac{\text{Jumlah aspek administrasi umum yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah total aspek administrasi umum yang wajib}} \right) \times 100\%$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah unit atau paket komponen instalasi listrik dan sistem penerangan yang disediakan dan dipasang pada bangunan kantor dalam rangka menjamin kelayakan, kenyamanan, dan keamanan operasional gedung.	Jumlah Paket Instalasi yang Disediakan = $\sum$ (Jumlah unit/paket per komponen listrik yang diadakan)	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah unit atau paket peralatan dan perlengkapan kerja yang disediakan oleh perangkat daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.	Jumlah Paket Peralatan/ Perlengkapan = $\sum$ Jumlah barang yang disediakan	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga = $\sum$ Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan = $\sum$ Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan = $\sum$ Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah laporan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai bukti administratif atas kegiatan penerimaan, pendampingan, dan/atau koordinasi kunjungan tamu resmi, baik dari instansi pemerintahan, swasta, organisasi masyarakat, maupun individu tertentu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu = $\sum$ Jumlah laporan resmi yang dibuat per kunjungan tamu	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai bukti administratif atas kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi = $\sum$ Jumlah laporan resmi yang dibuat per kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis yang tersusun	Jumlah Dokumen = Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis yang tersusun	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang tersusun	Jumlah Dokumen = Jumlah dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang tersusun	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	Jumlah total unit Barang Milik Daerah yang diperoleh/dibeli/disediakan dalam satu periode anggaran	Jumlah BMD = Jumlah BMD yang diadakan dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah total unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperoleh/dibeli/disediakan dalam satu periode anggaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan = Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Jumlah total unit Alat Besar yang diperoleh/dibeli/disediakan dalam satu periode anggaran	Jumlah Alat Besar = Jumlah Alat Besar yang diadakan dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Jumlah total unit Mebel yang diperoleh/dibeli/disediakan dalam satu periode anggaran	Jumlah Mebel = Jumlah Mebel yang diadakan dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah total unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperoleh/dibeli/disediakan dalam satu periode anggaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya = Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah total unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperoleh/dibeli/disediakan dalam satu periode anggaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya = Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah total unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperoleh/dibeli/disediakan dalam satu periode anggaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya = Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	$= \left(\frac{\text{Jumlah jenis jasa penunjang yang tersedia}}{\text{Jumlah jenis jasa penunjang yang dibutuhkan}} \right) \times 100\%$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Laporan	Jumlah laporan jasa surat menyurat yang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Jumlah laporan jasa surat menyurat = $\sum$ Jumlah laporan resmi yang dibuat per kegiatan jasa surat menyurat	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik = $\sum$ Jumlah laporan resmi yang dibuat per kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan / Output						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	Jumlah total unit Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam satu periode anggaran	Jumlah BMD = Jumlah BMD yang dipelihara dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah total unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam satu periode anggaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya = Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah total unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam satu periode anggaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya = Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Jumlah total unit Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya dalam satu periode anggaran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya = Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Jumlah total unit Mebel yang Dipelihara dalam satu periode anggaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara = Jumlah Mebel yang Dipelihara dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah total unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam satu periode anggaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara = Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu periode anggaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi = Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu periode anggaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi = Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu periode anggaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi = Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu periode anggaran	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Angka	Rata - rata perhitungan status mutu air	Rumus IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
		Indeks Kualitas Udara	Angka	Perhitungan rata-rata konsentrasi SO ₂ dan NO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1)\right)$ $I_{eu} = 50\% \text{ indeks } SO_2 + 50\% \text{ indeks } NO_2$		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Indeks Tutupan Lahan	Angka	Perhitungan luasan vegetasi	Rumus Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ Rumus di Tutupan Hutan; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG}$ Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal + BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal + BL_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar + BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FBG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FBEG}$		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Program / Outcome						
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan frekuensi kejadian pencemaran Lingkungan	%	Persentase penurunan jumlah kejadian pencemaran lingkungan hidup (air, udara, tanah, atau limbah) yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota dalam suatu periode waktu tertentu	$= \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Kasus Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya}} \right) \times 100\%$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Dokumen	Jumlah dokumen yang secara resmi disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari perencanaan, kebijakan, strategi, SOP, atau tindak lanjut teknis untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Jumlah Dokumen = $\sum$ Dokumen resmi pengendalian pencemaran/kerusakan yang disusun dalam 1 tahun	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sub Kegiatan / Proses						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan PencemaranLingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah Dokumen Uji = $\sum$ Laporan uji kualitas lingkungan per media yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas RumahKaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi data/informasi inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten/Kota untuk sektor-sektor lingkungan hidup (utamanya: kehutanan, limbah, pertanian, energi rumah tangga).	Jumlah Dokumen = $\sum$ Dokumen rapat teknis, sinkronisasi data, dan laporan hasil inventarisasi GRK	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan atau teknis yang disusun secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (melalui Dinas Lingkungan Hidup atau perangkat daerah terkait) untuk menangani pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, baik akibat aktivitas rutin, kejadian luar biasa (insidental), maupun kronis.	Jumlah Dokumen Penanggulangan = $\sum$ Dokumen teknis/rencana pemulihan yang disusun dan disahkan per tahun	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Laporan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi resmi kepada masyarakat mengenai peringatan dini, potensi pencemaran, atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perangkat daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Sosialisasi = $\sum$ Jumlah kegiatan sosialisasi resmi yang dilaporkan secara tertulis per tahun	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Program / Outcome						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Dokumen	Ketersediaan dokumen - dokumen perencanaan strategis bidang lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).	$= \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Tersedia}}{\text{Jumlah Dokumen yang Seharusnya Ada}} \right) \times 100\%$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang disusun	Dokumen	Jumlah muatan substansi wajib yang berhasil disusun dan dituangkan dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan RPPLH = $\sum$ Jumlah substansi wajib yang termuat secara lengkap dan sesuai pedoman	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH Kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berisi arahan kebijakan dan strategi lingkungan hidup daerah, serta mengakomodir arahan dan keterkaitan dengan RPPLH Provinsi.	Jumlah Dokumen RPPLH = $\sum$ Dokumen RPPLH Kab/Kota yang Final dan Terintegrasi dengan RPPLH Provinsi	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan / Output						
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS tersusun	%	Persentase dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun	$= \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen KLHS Tersusun Final}}{\text{Jumlah Dokumen KLHS yang Seharusnya Disusun}} \right) \times 100\%$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun	= Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Program / Outcome						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)	Angka	Indikator komposit nasional yang mengukur kondisi ekologis kawasan daratan dan perairan Indonesia secara kuantitatif melalui analisis tutupan lahan hijau (vegetasi) dan perairan (badan air alami).	$IHBI = \left(\frac{\text{Indeks Hijau} + \text{Indeks Biru}}{2} \right)$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH perkotaan	%	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan terhadap luas wilayah perkotaan sesuai delineasi wilayah administrasi kota/kabupaten.	$= \left(\frac{\text{Luas Total RTH (Publik + Privat)}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan}} \right) \times 100\%$	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar (Ha)	Luas total Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola secara langsung atau melalui penugasan oleh pemerintah kabupaten/kota, baik berupa taman kota, taman lingkungan, jalur hijau, hutan kota, taman median jalan, maupun ruang terbuka lainnya yang ditanami vegetasi dan digunakan untuk fungsi ekologis, sosial, maupun estetika.	Luas RTH (Ha) = $\sum$ Luas masing-masing area RTH yang dikelola	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sasaran						
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	Angka	indikator komposit yang mengukur tingkat kinerja pengelolaan sampah suatu daerah (kabupaten/kota) berdasarkan berbagai aspek yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan sampah, baik dari sisi kelembagaan, teknis, partisipasi masyarakat, hingga pemanfaatan data dan pelaporan.	IKPS = $\sum$ (Nilai Tiap Komponen $\times$ Bobot Komponen)	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Program / Outcome						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	Persentase jumlah sampah yang berhasil diolah melalui fasilitas pengolahan sampah	$= \left(\frac{\text{Jumlah Sampah yang Diolah di Fasilitas}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \right) \times 100\%$	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan / Output						
	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	Persentase total volume sampah yang berhasil tertangani dibandingkan dengan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dalam wilayah kabupaten/kota pada periode tertentu	$= \left(\frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \right) \times 100\%$	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Unit	Jumlah individu, kelompok masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, filantropi, atau mitra lainnya yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti pengurangan, pemilahan, pemanfaatan ulang, pengolahan, dan daur ulang sampah di tingkat rumah tangga, RT/RW, desa/kelurahan, sekolah, pasar, atau kawasan lainnya.	Jumlah Terlibat Aktif = Total individu/kelompok/lembaga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	= Jumlah keseluruhan sampah yang tertangani	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Program / Outcome						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	Persentase keterlibatan masyarakat (baik individu maupun kelompok) dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), dibandingkan dengan jumlah total sasaran masyarakat atau populasi yang memiliki potensi untuk dilibatkan.	$= \left(\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terlibat dalam PPLH}}{\text{Jumlah total masyarakat atau sasaran partisipasi}} \right) \times 100\%$	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh (%)	%	Persentase penghargaan di bidang lingkungan hidup yang berhasil diperoleh oleh pemerintah daerah, lembaga, masyarakat, sekolah, dunia usaha, atau organisasi lain yang menjadi binaan/mitra dari Dinas Lingkungan Hidup, dibandingkan dengan jumlah total penghargaan yang diusulkan, diikuti, atau diajukan selama periode waktu tertentu.	$= \left(\frac{\text{Jumlah penghargaan yang diperoleh}}{\text{Jumlah usulan/partisipasi yang diajukan}} \right) \times 100\%$	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Unit	Jumlah individu atau lembaga dari berbagai unsur non-pemerintah seperti masyarakat umum, lembaga masyarakat, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan filantropi yang telah dilakukan penilaian kinerja oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam rangka Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	Jumlah dinilai = Jumlah total entitas (orang/lembaga) yang telah dilakukan penilaian kinerja lingkungan dalam periode tertentu	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sasaran						
	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	Penurunan GRK pendukung ekonomi (energi, industri dan pertanian)	Ton CO ₂ e	Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor pendukung ekonomi, yaitu energi (listrik dan bahan bakar), industri (proses produksi), dan pertanian (budidaya, peternakan, dan penggunaan lahan) dalam wilayah kabupaten/kota selama periode waktu tertentu, yang merupakan hasil dari upaya mitigasi atau efisiensi yang dilakukan.	Penurunan Emisi GRK (ton CO ₂ e) = Emisi dasar (baseline) - Emisi aktual setelah intervensi	Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Program / Outcome						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	Tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam dokumen izin lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal), izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin PPLH), serta peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku (PUU LH), seperti UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021, dan Permen LH lainnya.	$= \left(\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang taat}}{\text{Total usaha/kegiatan yang diawasi}} \right) \times 100\%$	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen resmi hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal) dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen = Jumlah seluruh dokumen pembinaan dan pengawasan yang sah dan terdokumentasi terhadap usaha/kegiatan berizin dari Pemda Kabupaten/Kota	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan usaha / kegiatan	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam periode tertentu, baik secara langsung (inspeksi lapangan) maupun tidak langsung (verifikasi dokumen, pemanggilan, atau pemantauan daring).	Jumlah Pengawasan = Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan dalam periode tertentu	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Program / Outcome						
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	%	Persentase jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan (disimpan, diangkut, dimanfaatkan, diolah, atau ditimbun secara benar dan berizin), dibandingkan dengan total jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha/kegiatan di suatu wilayah pada periode tertentu (misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan).	$= \left(\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang dikelola secara legal}}{\text{Total limbah B3 yang dihasilkan}} \right) \times 100$	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Kegiatan / Output						

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase usaha yang memiliki ijin B3	%	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), baik berupa izin pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pemanfaatan, maupun pengolahan, dibandingkan dengan jumlah total usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 di wilayah tertentu (misalnya kabupaten/kota).	$= \left(\frac{\text{Jumlah usaha yang memiliki izin B3}}{\text{Jumlah total usaha penghasil limbah B3}} \right) \times 100$	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
	Sub Kegiatan / Proses						
	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Dokumen	Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam membantu pelaku usaha untuk memenuhi rincian teknis yang diperlukan dalam dokumen persetujuan lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau Amdal), yang akan diintegrasikan secara otomatis ke sistem OSS (Online Single Submission).	Jumlah Fasilitasi Rincian Teknis (OSS) = Jumlah kegiatan fasilitasi atau permohonan teknis yang dibantu DLH dan tercatat dalam sistem OSS atau dokumen pendampingnya	Triwulan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak